

Citra Sulawesi Tengah Dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, April 2005

Citra Sulawesi Tengah Dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, April 2005

Sambutan

Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan untuk memupuk cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Dengan mencermati informasi yang tersimpan dalam arsip akan diperoleh informasi akurat dan

obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam program ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI dan Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 13 April 2005
Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul_____	i
Sambutan Kepala ANRI_____	iii
Daftar Isi_____	vi
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	2
B. Letak Geografis dan Wilayah Administratif _____	3
C. Periode Kesultanan Riau _____	5
D. Periode Kolonial Belanda _____	6
E. Periode Pendudukan Jepang _____	8
F. Periode Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI _____	8
G. Pembentukan Provinsi _____	11
H. Kepulauan Riau dalam Khasanah Arsip _____	16
Daftar Pustaka_____	20
CITRA KEPULAUAN RIAU DALAM ARSIP _____	
Geografis_____	22
Pemerintahan_____	31
Politik dan Keamanan_____	56
Ekonomi dan Keuangan _____	70
Pertambangan_____	82
Sosial dan Kesehatan _____	108
Pendidikan _____	114
Budaya dan Pariwisata _____	123
Keagamaan _____	135
DAFTAR ARSIP _____	139
PENUTUP _____	156

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang selama ini terjadi. Dalam pelaksanaannya, Otonomi Daerah ini belum berjalan dengan mulus.

Citra Sulawesi Tengah dalam Arsip diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Melalui materi yang ditampilkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu senantiasa ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang akan menerima Citra Daerah pada Tahun 2005 ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Arsip Sulawesi Tengah yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu mulai awal abad 18 sampai dengan abad 20, yakni sejak masa VOC sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada periode tersebut, yang diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan meningkatkan upaya perluasan khasanah arsip statis Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Gambaran Sejarah

Sulawesi Tengah yang kita kenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, baik dalam proses pembentukan administrasi maupun sebagai komunitas di kawasan Sulawesi. Kawasan ini telah pula memiliki interaksi dengan berbagai kebudayaan dan kepentingan yang ada di wilayah Nusantara, maupun dengan dunia internasional. Perjalanan sejarah panjang itu yang kemudian mengukuhkan keberadaannya sebagai sebuah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam perjalanannya menuju Maluku, Portugis menemukan Pulau Sulawesi (Celebes) di tahun 1525. Kontak dengan bangsa Barat kemudian juga terjalin dengan Spanyol dan Belanda, melalui Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Di masa-masa berikutnya Belanda mendominasi kekuatan politik di Sulawesi Tengah, mengalahkan dua pendahulunya.

Hubungan dengan penguasa lokal di Sulawesi Tengah, seperti: Banawa, Tawaeli, Palu, Loli, dan Sigi, mulai tampak intensif pada tahun 1669-an. VOC menjalin hubungan dagang, khususnya emas, dengan penguasa lokal Sulawesi Tengah. Untuk mengusir kekuatan Spanyol, VOC menjalin hubungan dengan Parigi.

Kontak dagang ternyata berdampak pada campur tangan politik. Hubungan dagang dengan Kaili juga disertai alasan mengamankan armada kapal VOC dari ancaman bajak laut di kawasan perairan Selat Makassar. Loji Belanda dibangun di

Parigi dan Lambunu. Loji di Parigi juga dimaksudkan untuk mengawasi pertambangan emas di sekitar tempat tersebut.

Ketika produksi emas mulai merosot, VOC mulai mencoba menjalin kontak dengan Kerajaan Bwool/Buol, yang sudah memiliki hubungan dagang dengan Portugis sejak 1592. Untuk mengamankan perdagangan di daerah ini, VOC mulai menaklukkan raja Bwool/Buol.

Di abad ke-15 sampai ke-17, laut di sebelah barat Sulawesi Tengah merupakan batas wilayah pengaruh kerajaan Ternate. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda atau informasi bahwa bangsa barat memperkuat posisinya di kawasan ini.

Kawasan Sulawesi dikelilingi benteng bangsa-bangsa Barat, seperti: Portugis memiliki benteng di Ternate pada tahun 1522-1574, Spanyol di Tidore di tahun 1542-1545 dan Portugis pada tahun 1578-1605. Di Ambon, Portugis juga memiliki benteng pada tahun 1528-1605, dan di Banda pada tahun 1523. Pos-pos penting VOC ada di Minahasa pada tahun 1679, di Makassar sejak tahun 1667, di Tidore sejak tahun 1657, di Pulau Buru tahun 1658, di Banda sejak tahun 1609.

Sampai tahun 1650, pos perdagangan VOC yang cukup penting di kawasan timur kawasan Nusantara bagian timur ada di Makassar dan Ternate. Menado sampai tahun 1792 menjadi tempat kedudukan *koopman*, dan Makassar menjadi tempat kedudukan *opperkoopman* atau gubernur dari *Gouvernement Macasser*. Sulawesi Tengah menjadi bagian dari dua posisi VOC tersebut.

Pada tahun 1800-an administrasi wilayah mulai ditata oleh pemerintah Hindia Belanda, dan di Sulawesi penataan dijalankan sejak tahun 1820-an. Pembentukan administrasi pemerintahan kolonial mulai dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda sesudah wilayah koloni di Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda. Pola pengaturan wilayah dan sistem administrasi pemerintahan setempat diberlakukan di Jawa-Madura dan wilayah-wilayah di luar Jawa yang disebut *Buitengewesten*.

Pemerintah Hindia-Belanda menerapkan sistem administrasi pemerintahan kolonial dengan menetapkan dua jenjang yang disebut *Europeesch-bestuur* dan *Inlandsch-bestuur*. Pada tingkatan *Europeesch-bestuur* jabatan dipegang

oleh pejabat Eropa, sedangkan pada *Inlandsch-bestuur* seluruhnya ditempatkan pejabat se tempat.

Di Jawa-Madura strata tertinggi pada *Inlandsch-bestuur* adalah para bupati (*regenten*), di wilayah luar Jawa (*Buitengewesten*) nama jabatan tertinggi *Inlandsch-bestuur* tersebut mengikuti adat kebiasaan setempat. Seperti misalnya di Sumatera Selatan (Bengkulen dan Palembang) disebut *kepala marga*, di Aceh disebut *oeleebalang*, di Minahasa disebut *hukum-besar* atau *mayor*, di Bali dinamakan *punggawa*. Para petinggi lokal itu juga mendapat gelar jabatan.

Wilayah yang sekarang adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, pada masa penguasaan kolonial terdapat dalam karesidenan Manado, Gubernemen Celebes dan wilayah sekitarnya (*Gouvernement Celebes en Onderhorigheden*), dan Karesidenan Ternate.

Menurut Surat Keputusan (*Besluit*) 31 Agustus 1864 yang dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1864 no. 128, wilayah sepanjang pantai utara dan yang terbentang di Teluk Tomini berada di bawah administrasi Karesidenan Manado. Dalam hal ini termasuk daerah Buol. Kepulauan Banggai berada di bawah administrasi Karesidenan Ternate (lihat *Besluit* 6 December 1866 no. 2, dan *Staatsblad* tahun 1866 no. 139).

Wilayah Palu, Towaeli dan Donggala termasuk dalam status "*bondgenootschappelijke landen*", yaitu wilayah perserikatan dari Kerajaan Kaili, yang tidak diperintah oleh pejabat Eropa, tetapi berada dalam wilayah administratif Gubernemen Celebes dan daerah sekitarnya.

Perubahan kemudian terjadi pada tahun-tahun awal abad ke-20 sejalan dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan. Menurut aturan yang dimuat dalam *Staatsblad* 1903 no. 249 dengan perubahan sementara (*Staatsblad* 1904 no. 321) dinyatakan bahwa Karesidenan Manado terdiri dari 8 *afdeelingen*.

Wilayah yang sekarang terdapat dalam Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Buol (Belanda menuliskannya Bwool) pada tahun 1904 itu adalah sebuah *afdeeling* dengan ibukota Paleleh, masuk dalam Karesidenan Manado. Wilayah yang terletak di Teluk Tomini juga mejadi salah satu *afdeeling* (dengan ibukota Poso), masuk dalam Karesidenan Manado. Dalam *afdeeling* Tomini ini

adalah daerah Moutong, Sigenti, Kasimbar, Toribulu, Ampibabo, Parigi, Sausu, Poso dan Tojo, juga Mapane.

Pada periode yang sama, Kaili yang memiliki status sebagai wilayah perserikatan tidak berubah. Hanya ada penambahan wilayah yang masuk dalam *bondgenootschappelijke landen* dari Kaili, sehingga seluruhnya adalah: Palu, Towaeli, Donggala, Sigi, Dolo, dan Belomaru. Sementara itu Kepulauan Banggai tetap berada di bawah administrasi Karesidenan Ternate.

Perubahan sistem administrasi pemerintahan terjadi lagi di tahun 1922 dan terakhir di tahun 1938. Menurut Keputusan Pemerintah 30 Juni 1938 no. 21, wilayah luar Jawa dibagi dalam: Gubernemen Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan *Groote Oost*. Yang termasuk dalam gubernemen *Groote Oost* ini adalah karesidenan *Celebes en Onderhorigheden*, Manado. Maluku, *Timor en Onderhorigheden*, Bali-Lombok. Wilayah ini nantinya yang pada periode penguasaan NICA, 1946-1949, menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT).

Dengan adanya perubahan ini, wilayah yang sekarang berada dalam Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam Karesidenan Manado. Karesidenan ini mempunyai 5 *afdeelingen* yang masing-masing berada di bawah seorang residen.

Dua di antara 5 *afdeelingen* itu adalah:

1. *Afdeeling* Donggala (ibukota Donggala) memiliki 4 *onderafdeelingen*, masing-masing berada di bawah seorang asisten-residen, atau *controleur*. Keempat *onderafdeelingen* itu adalah:
 - a. Donggala (ibukota Donggala) dengan daerah Banawa, Towaeli;
 - b. Palu (ibukota Palu) dengan daerah Palu, Sigi-Dolo, Kulawi;
 - c. Parigi (ibukota Parigi), dengan daerah Parigi, Moutong;
 - d. Toli-Toli (ibukota Kampungbaru), dengan daerah Toli-Toli.
2. *Afdeeling* Poso (ibukota Poso) dengan 3 *onderafdeelingen*, yaitu:
 - a. Poso (ibukota Poso) dengan daerah Poso, Lori, Tojo, dan Una-Una;

b. Kolonedale (ibukota Kolonedale), dengan daerah Bungku, dan Mori;

c. Banggai (ibukota Luwuk), dengan daerah Banggai.

Semua wilayah yang berada dalam administrasi *afdeeling* Donggala dan *afdeeling* Poso memiliki status "*zelfbesturende landschapper*", yaitu wilayah yang memerintah sendiri. Status tersebut diperoleh berdasarkan keputusan pemerintah Hindia-Belanda, dan menandatangani *Korte Verklaring* (Plakat Pendek) dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Keadaan ini tidak berubah hingga terjadi pergantian kekuasaan ketika wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan Jepang, Maret 1942-Agustus 1945.

Daerah Banggai juga dikenal sebagai *landschap* yang berada di laut Maluku, yang menunjuk pada sebuah kelompok pulau. Sebagian wilayahnya berada di pantai timur Sulawesi. Pulau-pulau terpentingnya adalah: Banggai, Lalobo, Bangkulu, dan Peleng. Perdagangan berjalan baik, terutama dengan Gorontalo dan Ternate. Hasil-hasil penting dari daerah ini antara lain: kayu, kelapa, sagu, rotan, dan mika.

C. Kondisi Sosial

Donggala memiliki tempat berlabuh kapal yang cukup baik, khususnya di daerah Teluk Palu. Penduduk mayoritasnya adalah orang-orang Bugis. Kaum perantauan yang banyak tinggal di daerah ini adalah: orang-orang Cina dan Arab.

Onderafdeeling Palu pada tahun 1915 berpenduduk sekitar 47.000 jiwa, 30 orang Eropa, dan 70 orang Cina. Di wilayah Palu juga ditemukan areal persawahan dan areal tanaman kelapa yang cukup subur. Wilayah subur itu berada di sepanjang sungai Palu. Ada pula jaringan air minum sepanjang 25 km.

Penduduk *Onderafdeeling* Poso, pada tahun 1915 sekitar 50.000 jiwa, 30 orang penduduk Eropa, 100 orang Cina, dan 30 orang Arab.

Di sebelah timur berbatasan dengan sungai Malei, di sebelah barat berbatasan dengan sungai Tambrana dan pegunungan di daerah Sulawesi Tengah yang letaknya berbatasan dengan Sausu dan *Berglandschappen*. Di sebelah

selatan berbatasan dengan kelanjutan pegunungan Sulawesi Tengah, dimana ada kerajaan Luwu yang berada di Teluk Bone.

Onderafdeeling Toli-Toli (juga dikenal dengan Tontoli) penduduknya terdiri dari orang Toli-Toli dan orang Dandoe, yang berbaur dengan orang-orang Bugis, Bajo, Kajelie, dan Toradja. Sampai tahun 1915 bermukim di daerah ini sekitar 13.200 orang, yang terdiri dari orang Eropa, 170 orang China, dan 100 orang Arab, dan berbagai kelompok timur asing lainnya.

Penduduk di Sulawesi Tengah sebagian besar beragama Islam. Sampai tahun 1980 jumlah penduduk Muslim sekitar 70-89%. Islam mulai tampak mendominasi beberapa daerah Sulawesi Tengah sejak tahun 1550-an. Pengaruh Islam mulai datang ke sebagian daerah ini sejak tahun 1460. Sementara itu sampai tahun 1927 jumlah penduduk Muslim yang menunaikan ibadah haji sekitar 1-30%, dan jumlah itu terus meningkat sampai sekitar 76,5% di tahun 1980-an.

Pemerintah Hindia Belanda sendiri melarang para pekabar Injil menyebarkan agama Nasrani di pantai sekitar pantai barat dan bagian utara Sulawesi Tengah. Sebenarnya sampai akhir abad ke-19 wilayah Sulawesi Selatan belum tersentuh oleh pengaruh Zending.

Sampai tahun 1980-an jumlah penduduk Nasrani mencapai 20,6% di seluruh Sulawesi Tengah. Kelompok masyarakat yang beragama Hindu dan Budha sekitar 2,8%, dan penganut Konfusianisme kurang dari 0,1%. Di tahun 1990 penduduk yang beragama Islam berjumlah 76% dan Protestan sebesar 18%.

D. Sulawesi Tengah Menjelang Kemerdekaan

Ide-ide pergerakan yang muncul di Pulau Jawa, meluas ke Sulawesi Selatan. Organisasi-organisasi pergerakan yang berkembang di kawasan ini antara lain: ***Sarekat Islam*** (SI) pada tahun 1916 di daerah Bwool/Buol Toli-Toli. Di tahun 1917, Sarekat Islam (SI) didirikan di Donggala, pesisir Mori pada tahun 1918, dan pada tahun 1926 ke daerah Banggai. ***Partai Nasional Indonesia*** (PNI) yang didirikan oleh Soekarno berkembang di Buol pada sekitar tahun 1928. Muhammadiyah membuka cabang di beberapa daerah Sulawesi Tengah pada

tahun 1932, demikian pula dengan ***Partai Sarekat Islam Indonesia*** (PSII).

Perkembangan organisasi-organisasi pergerakan itu dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Seperti halnya yang terjadi di Jawa dan Sumatra, para tokoh politik lokal akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Seorang tokoh SI, Datu Pamusu (Raja Dolo) diasingkan ke Ternate. Tokoh SI yang lain adalah: Yoto Daeng Pwindu DS dan Abdul Rahim, dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Penangkapan dan pengasingan tidak menyurutkan niat para tokoh pergerakan yang lain untuk mengembangkan ide-ide nasionalisme dan kemerdekaan. Ketika di Gorontalo muncul Gerakan Merah Putih di bawah pimpinan Nani Wartabone dan Kusna Danupoyo, banyak kalangan di Sulawesi Tengah mendukungnya.

Perlawanan terhadap Belanda terjadi pada tanggal 25 Januari 1942. Saat itu terjadi pemberontakan dan pembunuhan terhadap kepala polisi Belanda, Inspektur Boertje di Bwool/Buol. Pemberontakan itu dipimpin oleh I.D. Awuy. Terjadi pula penangkapan terhadap ***controleur*** Toli-Toli, de Hoof, dan asisten residen Matata Daeng Masehe. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Januari 1942, terjadi penangkapan ***controleur Buol, de Vries***.

Akibat pemberontakan, pemerintahan Belanda di beberapa daerah Sulawesi terhenti atau bahkan berakhir. Gerakan Merah Putih pimpinan I.D. Awuy bersama H. Mahmuda, S.A. Alatas, H. Hamdi, H. Ibrahim, H. Said, M. Tahir, dan lain-lain dengan cepat mulai mengatur pemerintahan lokal.

Terjadi pengibaran Merah Putih di kota Toli-Toli. Upacara pengibaran itu dipimpin oleh M.S.H. Mallu. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Pemerintah Belanda seminggu kemudian mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Herberts. Pasukan itu mendarat di Toli-Toli dan langsung menggempur posisi para pemberontak.

Serangan pasukan Belanda itu menyebabkan perlawanan di beberapa daerah Sulawesi Tengah semakin meningkat. Tanggal 12 Februari 1942 di Luwuk para pejuang menyekap orang-orang Belanda dan mengibarkan bendera Merah Putih.

Namun, kondisi itu tidak berjalan lama. Jepang diketahui mendarat di Sulawesi Tengah sekitar bulan Mei 1942. Pada tanggal 15 Mei 1942, bala tentara Jepang mendarat di Luwuk. Seperti di tempat-tempat lain, kedatangan bala tentara Jepang awalnya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengetahui kedok politik bala tentara Jepang, yang tidak beda dengan penjajah yang lain.

E. Mempertahankan Kemerdekaan

Masa kekuasaan Jepang berjalan sampai bulan Agustus 1945, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Situasi merdeka di Sulawesi Tengah tidak bisa berjalan dengan sempurna untuk waktu yang lama. Berbagai kalangan di Sulawesi Selatan disibukkan dengan situasi revolusi menghadapi Sekutu dan pasukan Belanda.

Di awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah menjadi bagian Provinsi Sulawesi. Seperti sebagian besar pemerintah daerah di tempat lain, sistem pemerintahan tidak bisa berjalan sempurna. Di banyak tempat konsentrasi tertuju pada upaya mempertahankan kemerdekaan.

Provinsi Sulawesi dibentuk bersama dengan tujuh provinsi pertama di republik muda ini, yaitu: Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, dan Maluku. Gubernur pertama provinsi Sulawesi adalah: Dr. G.S.J. Ratulangi, yang mulai bertugas pada tanggal 19 Agustus 1945. Masa jabatan itu efektif hanya dalam waktu sembilan bulan, sebab wilayah ini dikacaukan dengan kedatangan Belanda pada bulan April 1946. Ratulangi ditangkap oleh pasukan Sekutu dan diasingkan ke Papua. Penangkapan Gubernur Ratulangi tidak menyurutkan perjuangan rakyat Sulawesi.

Untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat Sulawesi, dari tempat pengasingan dikirimkan berita-berita perjuangan. Orang-orang kepercayaan Ratulangi, seperti: Landau dan kawan-kawan yang dikirim ke Poso melalui Palopo, Ali Lemato dan kawan-kawan menuju Donggala dan Palu, dijadikan kurir dan menyusup ke berbagai kawasan di Sulawesi.

Upaya membentuk pemerintahan di Sulawesi selalu digagalkan oleh pemerintah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), apalagi setelah pasukan Sekutu meninggalkan kawasan Sulawesi Tengah. Sepeninggal pasukan Sekutu, musuh orang-orang republik semakin jelas, yaitu: Belanda.

Perjuangan bersenjata melawan Belanda dilakukan oleh organisasi-organisasi perjuangan, seperti: *Perjuangan Rakyat Indonesia Merdeka (PRIMA)* di daerah Sigi-Dolo, *Partai Rakyat Indonesia (PARINDO)* di daerah Wani, *Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GERIMA)* di daerah Tawaeli, *Angkatan Pemuda Indonesia (API)* di Palu dan *organisasi wanita* di Biromaru.

Pihak Belanda tidak hanya menerapkan strategi perang bersenjata saja. Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook, mencoba cara lain, dengan mencetuskan gagasan membentuk negara federal. Pertama-tama diadakan Konferensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946. Hasil penting konferensi itu adalah: Negara Indonesia nantinya berbentuk federal, dan akan ada masa peralihan kedaulatan dari Belanda.

Hasil konferensi Malino dimatangkan pada Konferensi Denpasar, yang diadakan pada tanggal 24-28 Desember 1946. Pada Konferensi Denpasar diputuskan untuk membentuk *Negara Indonesia Timur* (NIT). NIT dibentuk pada tanggal 24 Desember 1946 dan beribukota di Makassar. Presiden NIT yang pertama adalah: Tjokorde Gede Raka Sukawati. Wilayah NIT meliputi 13 daerah, yaitu:

1. Sulawesi Selatan;
2. Sulawesi Tengah;
3. Sulawesi Utara;
4. Minahasa;
5. Kepulauan Sangihe Talaud;
6. Bali;
7. Lombok;
8. Sumbawa;
9. Flores;
10. Sumba;
11. Timor dan pulau-pulau sekitarnya;
12. Maluku Utara.

13. Maluku Selatan.

Sulawesi Tengah terdiri dari dua *resort afdeling*, yaitu: Poso dan Donggala. Dua resort afdeling itu meliputi kerajaan-kerajaan Tojo, Poso, Lore, Una-una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi, Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Toli-Toli.

Pendirian NIT mendapat tantangan dari para tokoh perjuangan di daerah tersebut. Pada tanggal 2 Januari 1947 seluruh partai politik di Sulawesi Tengah mempersatukan diri ke dalam ***Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia*** (GAPRI). Upaya menentang keberadaan NIT terus dijalankan, khususnya melalui jalur parlemen. Dalam DPRD NIT yang dibentuk tanggal 30 Agustus 1949, ada IPPRI (***Ikatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia***), yang menuntut pembubaran NIT di parlemen.

F. Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kelompok-kelompok perjuangan di Sulawesi Tengah juga banyak yang mendukung pembubaran NIT. Ada sekitar 29 partai yang mendukung niat tersebut. Dalam sebuah rapat umum di Palu, dinyatakan bahwa sejak tanggal 6 Mei 1950 jam 07.00 tiga kerajaan di Sulawesi Tengah, yaitu: Palu, Sigi, Dolo, dan seluruh rakyatnya menyatakan melepaskan diri dari NIT dan bergabung dengan NKRI. Pernyataan itu ditandatangani oleh Tjahjo Idjazah dan R. Sungkowo dari pihak militer, dan Lumowa dari pihak kepolisian. Setelah peristiwa itu, keinginan untuk menyatukan diri ke dalam NKRI semakin banyak mendapat dukungan. Pemerintah NIT sendiri akhirnya menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah RI. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membubarkan NIT dan bergabung dengan ***Republik Indonesia Serikat*** (RIS). Pemerintahan Provinsi Sulawesi setelah berada dalam lingkungan RIS adalah: B.W. Lapien (selaku pejabat gubernur dari 17 Agustus 1950-4 Juli 1951), dan Sudiro sebagai gubernur. Pemekaran Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 47/Prp tahun 1960. Berdasarkan

Undang-Undang tersebut Provinsi Sulawesi dimekarkan menjadi: (1) Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (SULSERA) yang beribukota di Makassar; (2) Provinsi Sulawesi Utara-Tengah (SULUTTENG) yang beribukota di Manado. Berdasarkan Undang-Undang No. 13/1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi dua daerah tingkat I, yaitu: Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibukota Manado, dan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibukota Palu.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang wilayahnya dilalui oleh garis khatulistiwa. Posisi provinsi ini terletak pada 2° lintang utara sampai 3° lintang selatan, dan antara 119°-124° bujur timur. Sulawesi Tengah berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara di bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Secara administratif sampai tahun 2005, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kabupaten Banggai;
2. Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kabupaten Poso;
4. Kabupaten Donggala;
5. Kabupaten Buol;
6. Kabupaten Toli-toli;
7. Kabupaten Morowali;
8. Kabupaten Parigi-Moutong.
9. Kotamadya Palu;

Penulisan Citra Daerah Sulawesi Selatan menggunakan sumber-sumber tertulis dan visual (foto). Sumber-sumber itu digali dari (ANRI) yang berada di Jakarta dan beberapa sumber tertulis diperoleh dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Citra Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Arsip, pertama-tama digambarkan melalui aspek pemerintahan dan politik. Perkembangan pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah digambarkan melalui arsip-arsip daerah, seperti: arsip Manado, Ternate, dan besluit gubernur jenderal. Arsip-arsip ini memuat informasi tentang dinamika pemerintahan Sulawesi Tengah pada periode kolonial. Gambaran visual daerah Sulawesi Tengah pada

periode ini diperoleh melalui arsip peta. Perkembangan pemerintahan pasca kemerdekaan digambarkan melalui arsip-arsip kelembagaan seperti: Sekretariat Kabinet (SEKKAB), arsip peta/kartografi, dan arsip pribadi, Marzuki Arifin. Arsip-arsip ini tersimpan di ANRI-Jakarta. Disamping itu ada pula informasi dari arsip *Regering van Oost Indonesia*, arsip Pemerintah Sulawesi, arsip rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara-Provinsi Sulawesi Selatan, yang tersimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Dinamika politik Sulawesi Tengah pada periode kolonial digambarkan melalui arsip-arsip *Algemeene Secretarie*, khususnya *besluit* (keputusan) gubernur jenderal, dan arsip daerah Menado. Untuk periode kemerdekaan, informasi diperoleh dari arsip Kementrian Penerangan (KEMPEN) berupa foto, arsip peta/kartografi, Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara-Provinsi Sulawesi Selatan, arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi, dan arsip Kabinet Presiden.

Pada tahun 1950-an daerah Sulawesi Selatan dikunjungi para pejabat pemerintahan, termasuk kunjungan Presiden Soekarno. Kunjungan gubernur dan presiden itu diabadikan dalam koleksi KEMPEN, dan di dalam citra daerah ini dokumentasi peristiwa tersebut ditampilkan kembali.

Bangunan-bangunan bersejarah, seperti: benteng, situs peninggalan kerajaan setempat, dan perkantoran, ditampilkan dalam kategori "bangunan". Dokumentasi bangunan-bangunan itu diperoleh dari koleksi *Koninklijk Instituut voor de Tropen* (KIT) dan KEMPEN.

Perkembangan sarana dan prasarana transportasi di Sulawesi Tengah sejak awal abad ke-20 sampai akhir tahun 1950-an ditampilkan baik dalam bentuk peta maupun foto. Peta-peta tersebut diambil dari arsip kartografi, sedangkan foto-fotonya diambil dari KEMPEN dan KIT.

Aktivitas perekonomian kawasan Sulawesi Tengah pada periode kolonial digambarkan melalui khasanah *Algemeene Secretarie*, khususnya dari kumpulan *Missive Guberneur Secretarie* (MGS) dan Kommissorial. Pada bagian ini juga ditampilkan peta dari arsip kartografi. Foto-foto aktivitas perekonomian diambil dari KIT dan KEMPEN. Aktivitas

perekonomian rakyat, khususnya kerajinan rakyat Sulawesi Tengah ditampilkan dalam bentuk foto. Foto-foto tersebut diambil dari KIT.

Bagaimana pemukiman itu ada dan ditata, semuanya ditampilkan dalam bentuk foto. Gambaran tentang keberadaan bangunan tradisional dan modern diperoleh dari koleksi KEMPEN dan KIT.

Bidang agama dan pendidikan sudah lama menjadi perhatian pemerintah pusat maupun lokal. Gambaran bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui bidang agama dan pendidikan ditampilkan dalam bentuk arsip. Arsip-arsip tersebut diambil dari arsip Residensi Menado, arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi, dan Departemen Agama (DEPAG).

Pembangunan di bidang kesehatan di Sulawesi Tengah ditampilkan dalam bentuk foto dan arsip. Gambaran tentang keberadaan rumah sakit di Palu di awal abad ke-20 diambil dari foto KIT. Laporan keadaan kesehatan masyarakat di salah satu daerah di Sulawesi Tengah terlihat dari arsip milik *Algemeene Secretarie*.

Bagian akhir dari Citra Daerah Sulawesi Tengah menampilkan kesenian dan pakaian adat setempat. Informasi tentang kesenian dan pakaian adat diambil dari foto-foto KEMPEN dan KIT.

DAFTAR PUSTAKA

Cribb, Robert.

2000 *Historical Atlas of Indonesia*.

London and Singapore: Curzon Press and New Asian Library.

Day, Clive.

The Policy and Administration of The Dutch in Java.

New York-London: The Macmillan Company-Macmillan & Co, Ltd.

Henley, David.

2002 *Jealousy and Justice: The Indigenous Roots of Colonial Rule in Northern Sulawesi*.

Amsterdam: VU Uitgeverij.

Lapian, Adrian Bernard.

1987 **"Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah**

Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX". *Disertasi (tidak diterbitkan)*,

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Leirissa, R.Z.

1997 *Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan*

Indonesia: peristiwa Merah Putih dan Sebab-Musababnya.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Malesung Rondor.

1992 *Profil Propinsi Republik Indonesia: Sulawesi Tengah*.

Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Staatsblad van Nederlandsch Indie

1864, 1866.

Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie
1860-1941.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

Citra Sulawesi Tengah Dalam Arsip

Pemerintahan



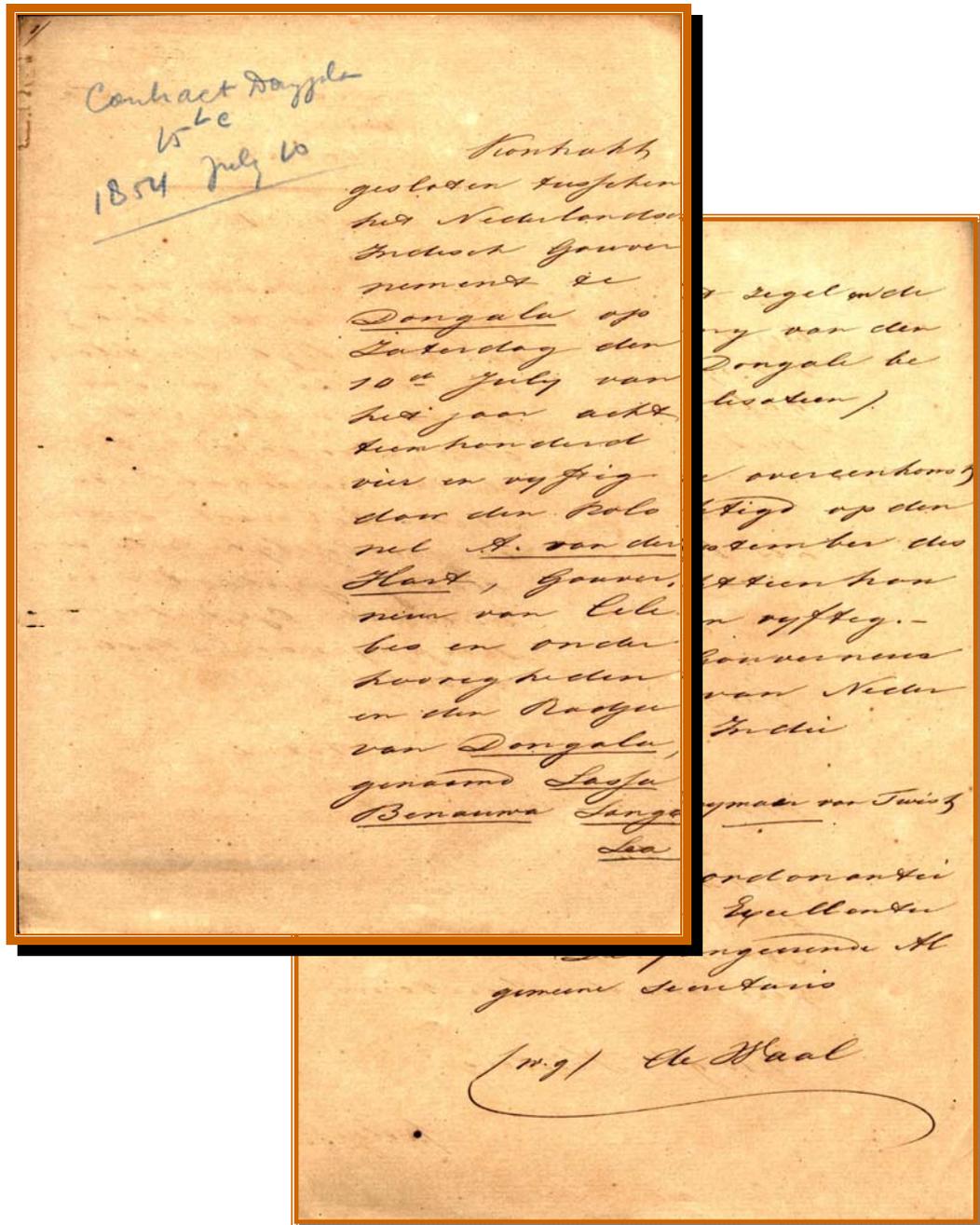
Kontrak Perjanjian antara Penguasa VOC dengan Raja Bwool/Buol dan Para Pembesar Kerajaan, ditandatangani di Ternate, 15 Agustus 1781.

Menado 66/2 K



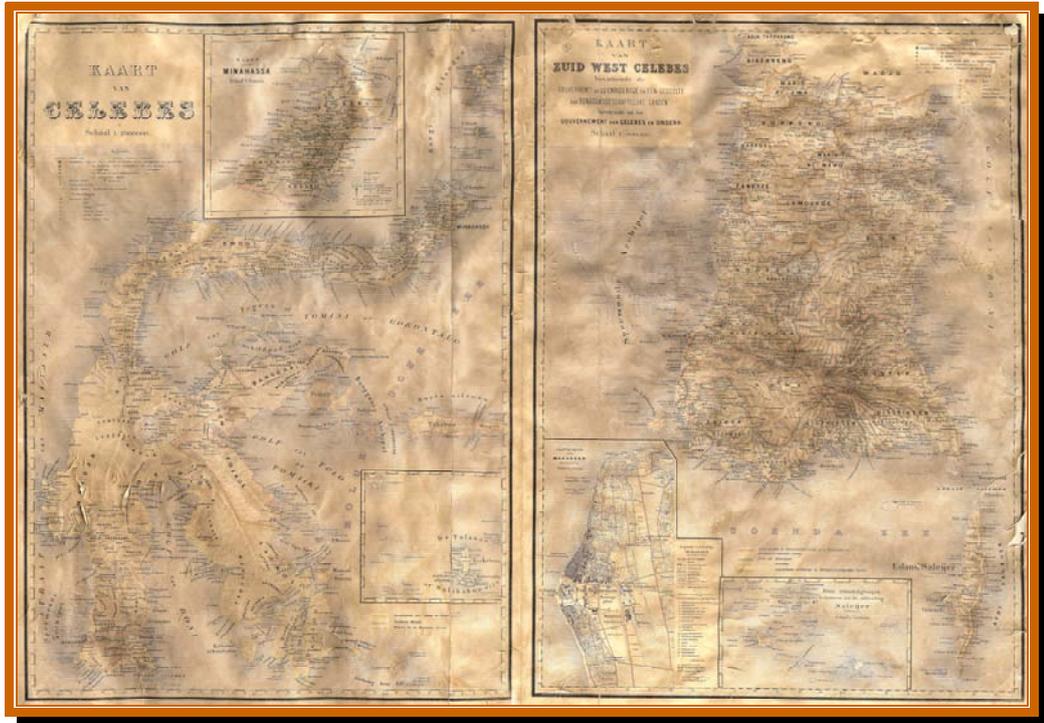
Kontrak Perjanjian Penguasa VOC dengan Raja Banggai dan Para Pembesarnya, ditandatangani di Ternate, 5 Maret 1796.

Ternate 140

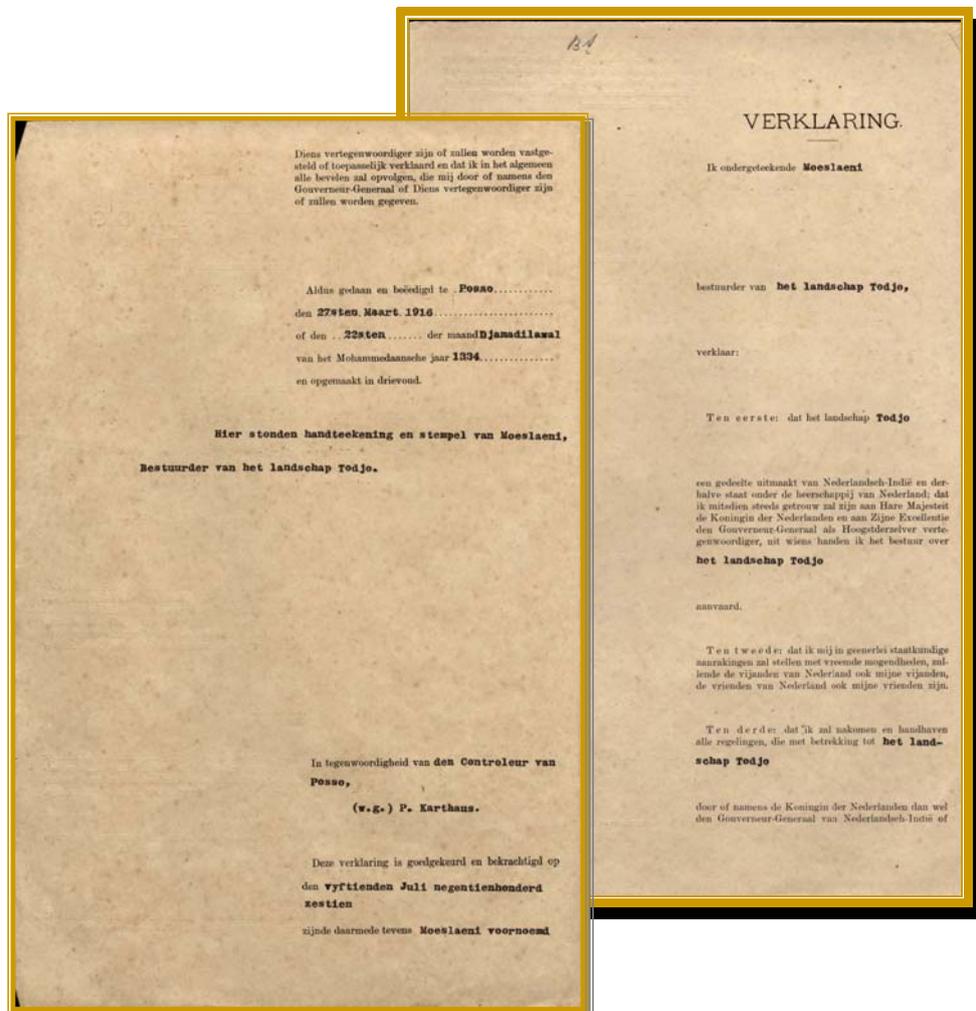


Salinan Kontrak Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Daggala, bernama Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona, tanggal 17 September 1854, terdiri dari 21 pasal.

Menado 66/2 L

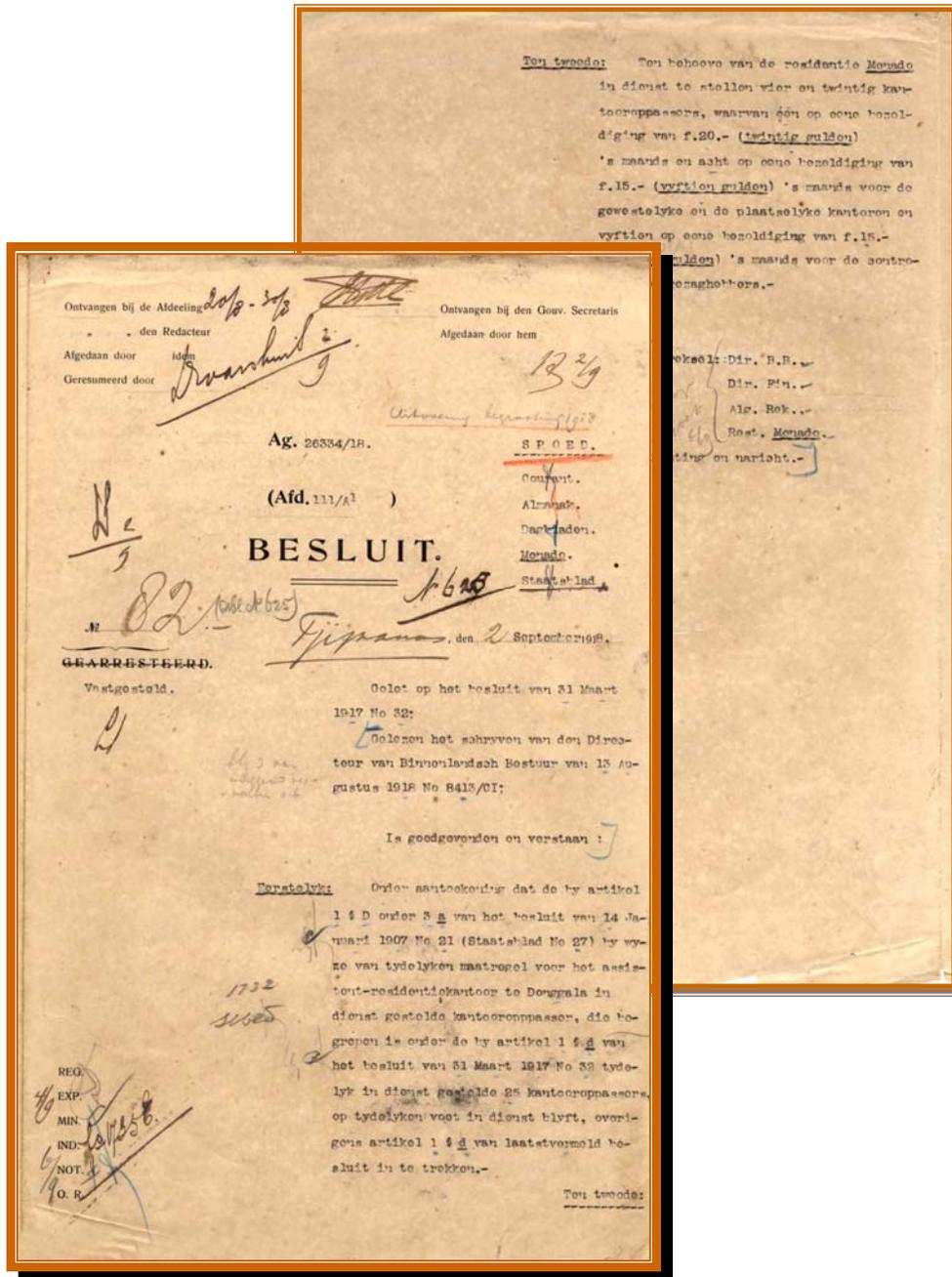


Kaart van Celebes (Peta Sulawesi)
Daftar Arsip Kartografi Nederlandsche Bezittingen in Oost Indie
1883 – 1885
No.12/Blad 12 Kode BB12/Blad 12

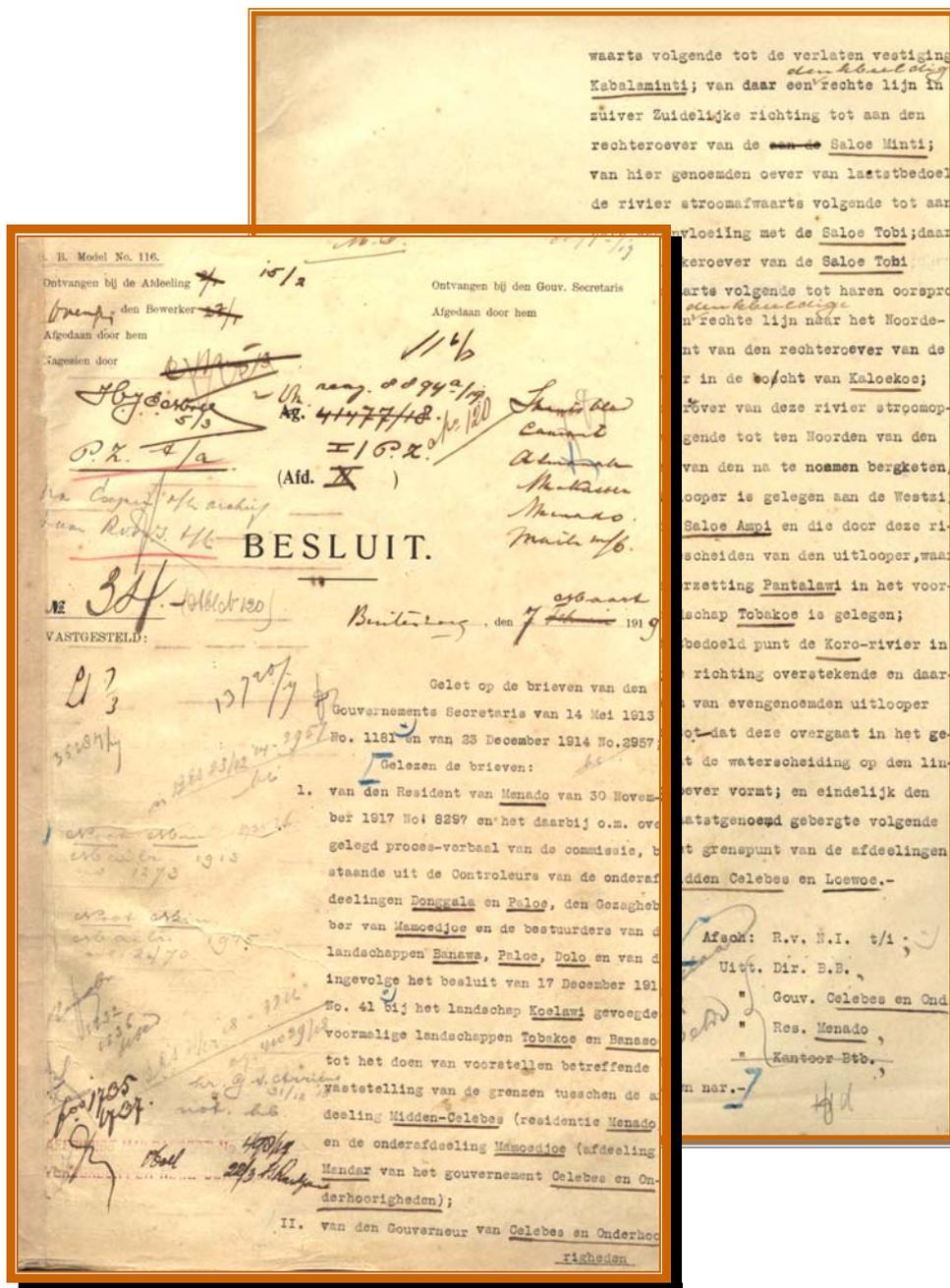


"Korte Verklaring" (Plakat Pendek) antara Moeslaeni, Kepala Daerah Tojo, di Poso, dengan pemerintah Hindia Belanda, 15 Juli 1916.

Besluit. 15 Juli 1916 no. 39



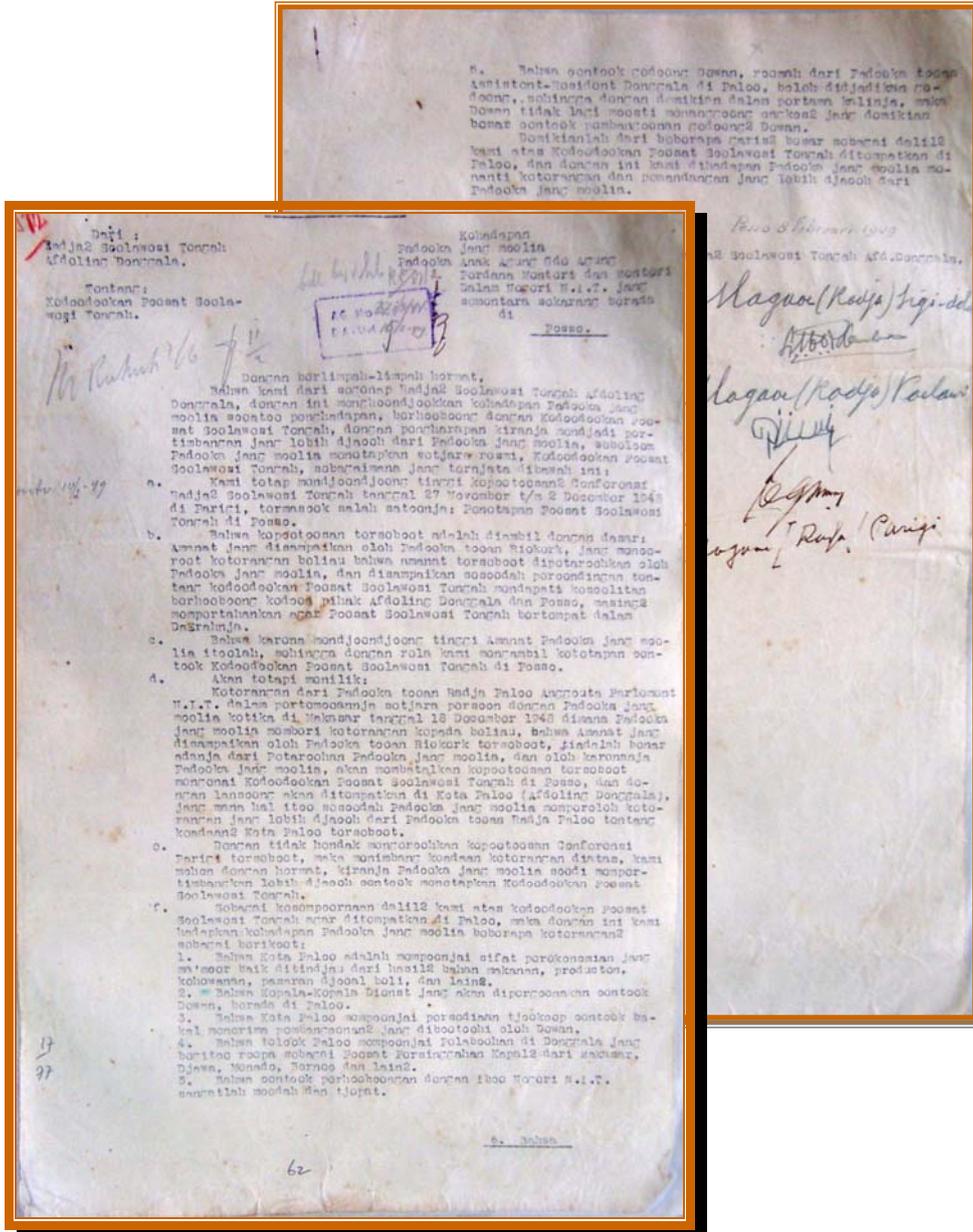
Keputusan mengenai besarnya gaji pesuruh di Kantor Asisten Residen Donggala.
Besluit 2 September 1918 no. 82



Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1919 no. 34 tentang garis batas antara daerah Sulawesi Tengah dan daerah Mamuju berdasarkan usul dari Wentholt (Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya) dengan proses verbal yang ditandatangani oleh kontrolir Donggala, raja Banawa, kontroler Palu, raja Palo, raja Dolo, raja Tobaku, raja Banao,
Besluit 7 Maret 1919 no. 34



Peta Donggala-Zuid (Donggala Selatan)
 Reproductiebedrijf Topografische dienst, Batavia 1941
 No.2523/Blad 74-75/XXI-XXII/143



Surat dari para raja yang ada di Sulawesi Tengah afdeling Donggala kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) tentang permohonan untuk menetapkan kota Palu sebagai pusat Sulawesi Tengah, 8 Februari 1949.

Arsip Regering van Oost-Indonesie, 1946 – 1950. No.77(a)
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

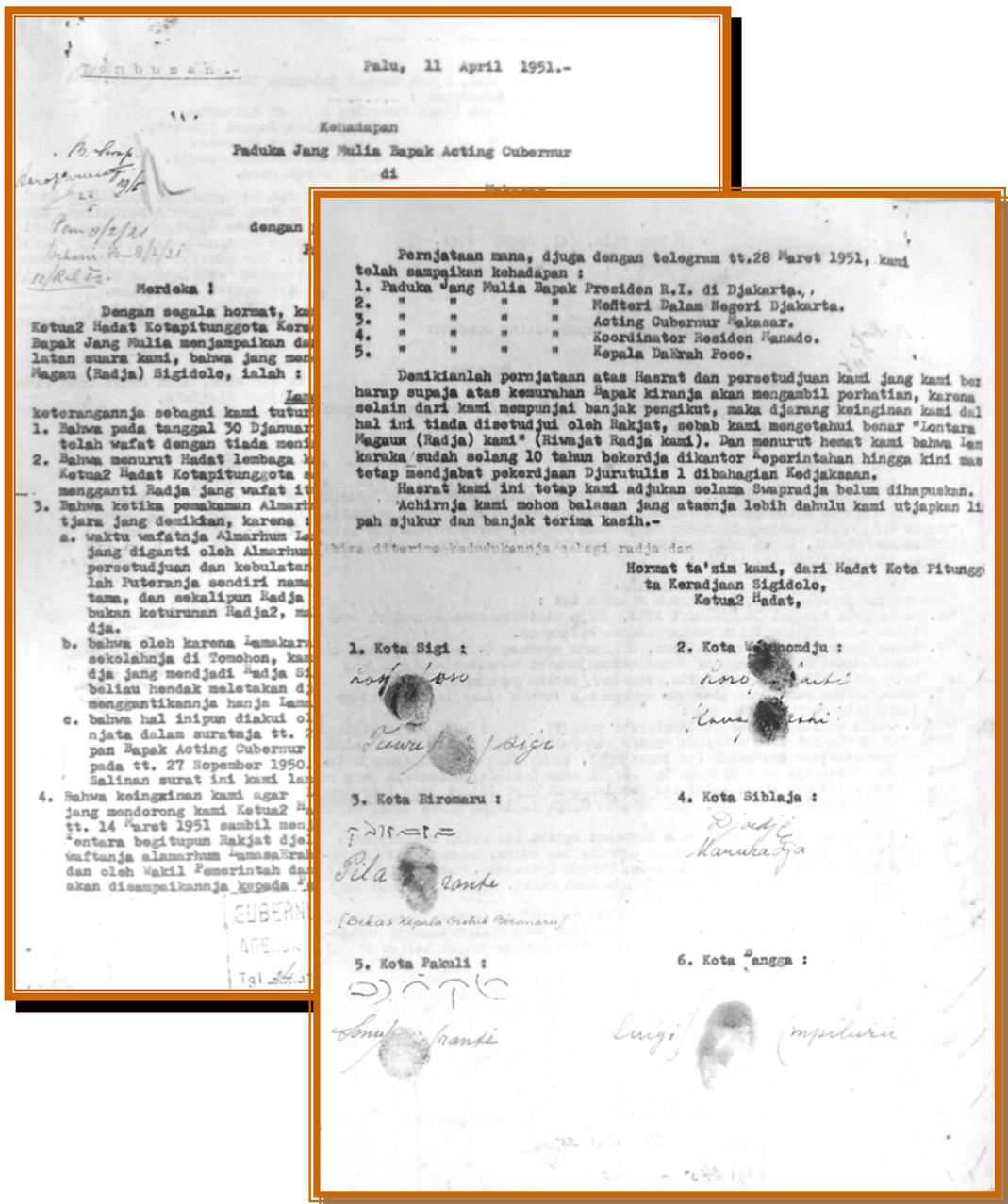
DASAR PERKANDANGAN JANG MENGENAI "KOTA PALU"
DAN SEKITARINJA

- (1) D'awa penduduk ada lebih; dan dikepalai oleh "Delapan Radja".
- (2) KOTA PALU, letaknja amat mudah dikundjungi oleh penduduk2 dari: onderafdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli2 berhubung dengan letaknja terdapat di Centrum (pusat lembah afd. Donggala-Palu). Perhubungan2 ini dapat dihubungkan, oleh:
- a. Motor2 laut atau perahu dengan negeri2 dipesisir pantainja misalnja Palu dengan Donggala, Wani, Tompe (TawaEli Utara) dan Sabang (Banawa Utara).
 - b. Selain dengan perhubungan laut, maka dapat pula dengan perhubungan darat misalnja dengan auto dan pedati2. Ketjuai ke Toli2 perhubungan darat itu ada sedikit lagi belum dikerjakan yakni dibahagian Ogoasas, akan tetapi sementara diusahakan dan tidak memakan begitu banyak ongkos.
 - c. Seluruh onderafdeling Balu dapat berkundjungan dengan auto dan digunung2njapun telah dapat didjalani dengan kuda.
 - d. Djalan2 jang djauh dapat ditempuh dengan auto:

ke Parigi	86 k.m.	
" Sabang (Banawa Utara)	155 k.m.	
" Donggala	54 k.m.	
" Kulawi-Gilipu	80 k.m.	25 km = 105 k.m.
" Tinombo-Ongka	251 k.m.	
- jang dekat2 tidak dikatakan lagi.
- (3) Perhubungan DONGGALA-Palu, rata2 tiap bulan disinggahi kapal 12 kali 24 djam ke Makoasar dan 50 djam ke Manado.
- (4) Daerah ini mempunyai perhubungan mudah sekali ke Kalimantan dengan kapal2 maupun perahu2 lajar.
- (5) Kota Palu, mempunyai tjukep persediaan rumah2 untuk pegawai2 dan gedung2 kantor dimana jang ada sekarang misalnja:
- | | | |
|-----|------------------------------|-----|
| " " | " HPE " | " " |
| " " | " Landschap (Keradjaan) Palu | " " |
| " " | " Landschapswerken | " " |
| " " | " Perhutanan | " " |
| " " | " Pertanian | " " |
| " " | " Peternakan chewan | " " |
| " " | " Perguruan | " " |
| " " | " M.T.D. | " " |
| " " | " A.V.E. | " " |
| " " | " Kawat (Radiostation) | " " |
| " " | " Zoutbedrijf | " " |
- (6) Daerah ini mempunyai tanah persediaan (tanah2 kosong) jang dapat diperkebuni dan letaknja dekat kesebelah Selatan Palu, Lindu (Kulawi Utara) dan Palolo (Sigidolo)
- (7) Daerah ini ada mempunyai tempat Pasanggrahan untuk beristirahat (berjaman) jang terdapat digunung2 jang baik, yakni:
- I. Di Matantimeli (Palu) djaraknja 16 k.m. dari Palu-kota
 - II. Di kebun kopi (TawaEli) " 42 " " "
 - III. Di Kulawi " 7 k.m. " "
- (8) Daerah ini ada kedudukan Landing Bela Tentara Keselamatan (L.D.M.) berpusat di Kulawara Sigidolo (Palu) jang mempunyai luas lapangan pekerjaannja jang dikepalai 6 tenaga bangsa Eropa.
- (9) Daerah ini ada mempunyai ternak jang djauh mengatasi dari lain2 daerah (dari djumlah matjannja) ternak.
- (10) Pergakolnhan:
KOT. Palu, ada mempunyai:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 (satu) S.R.U. | " 4 tahun |
| 2 (dua) S.R.U. | " 6 " |
| 1 (satu) sekolah liar | jang berazas Agama Islam |
| 1 (satu) " | " " Tionghoa |

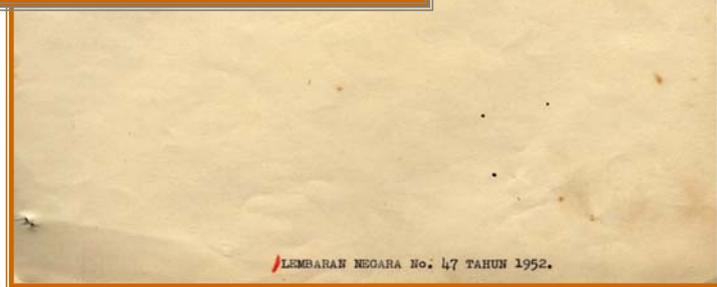
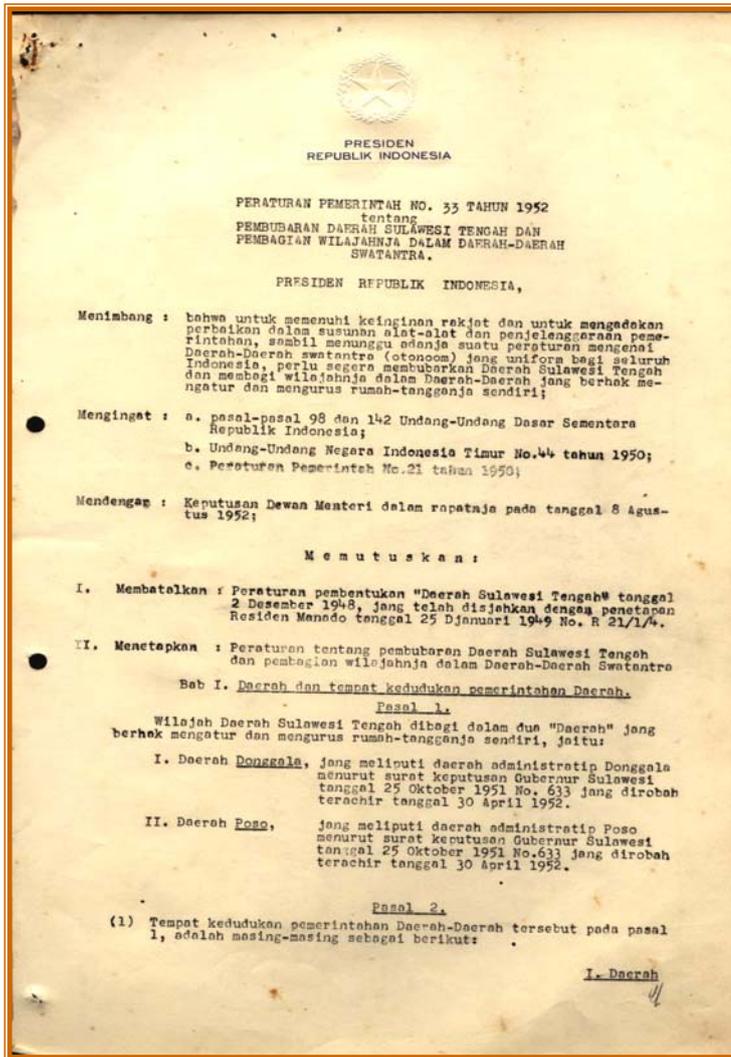
Surat pertimbangan rakyat Palu untuk menetapkan kota Palu sebagai pusat Sulawesi Tengah, April 1949.

Arsip Regering van Oost-Indonesie 1946 – 1950 No.77
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

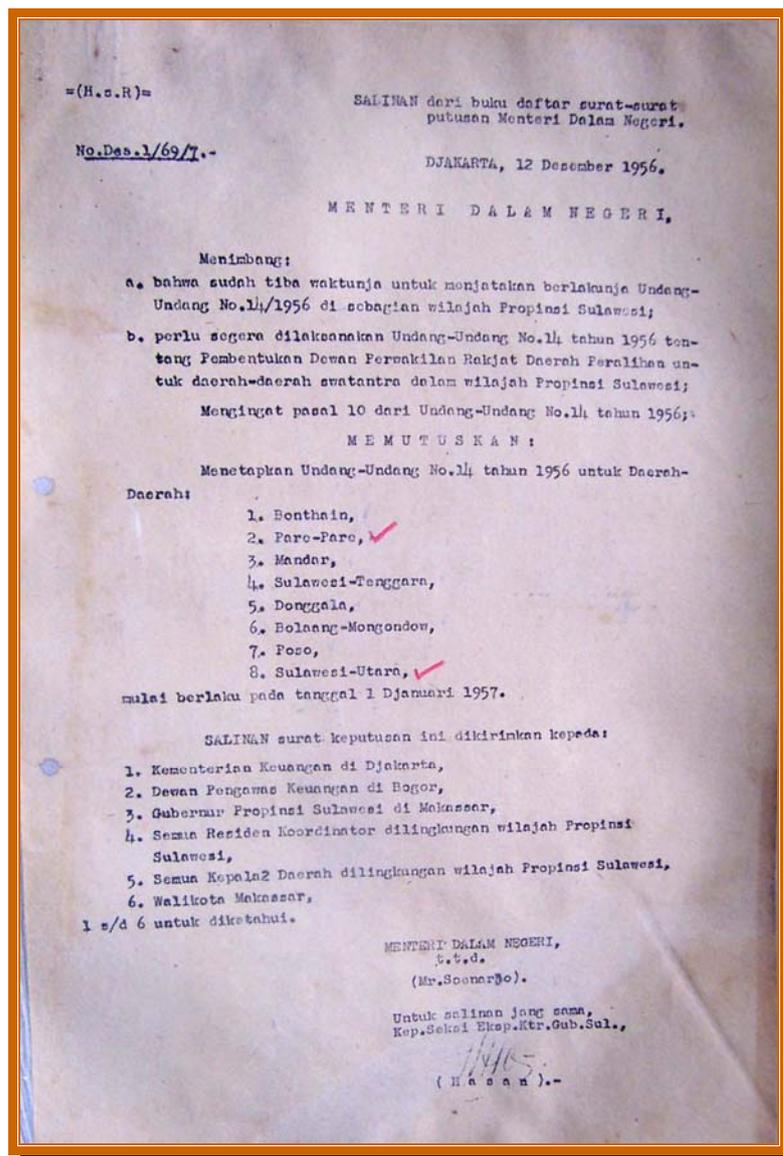


Surat dari Ketua-ketua Adat Kotapitunggota Sigidolo kepada Pejabat Gubernur Sulawesi di Makassar tanggal 11 April 1951 tentang dukungan kepada Lamakarakaka menjadi raja Sigidolo dan keinginan itu akan tetap dilanjutkan selama swapraja belum dihapuskan.

Arsip Pemerintah Sulawesi 1950 – 1960 No. 196(a)
 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 tentang Pembubaran
Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam
Daerah-daerah Swatantra
Sekkab, Peraturan Pemerintah Tahun 1950-1960



Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des 1/69/7 tentang berlakunya Undang Undang No.14 Tahun 1956 untuk daerah-daerah: Bonthain, Pare-pare, Mandar, Sulawesi Tenggara, Donggala Poso, Bolaang-Mongondow, Sulawesi Utara, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1957.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960, No.161
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
tanggal 4 Djuli 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO,

MENTERI DALAM NEGERI,

Sanarsi Hardjadinata
SANORSI HARDJADINATA.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No.29 TAHUN 1959,

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH DAERAH TINGKAT II

DI S U L A W E S I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 perlu segera dilaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;
- b. bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang bersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk - sesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a diatas - melaksanakan pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dimaksud;

- Mengingat : 1. pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

I. A. Dengan mentjabat :

a. Undang-undang Darurat :

- No.2 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Djenepono-Takalar;
 - No.3 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Torudja dan Daerah Luwu;
 - No.4 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wadjo dan Daerah Soppeng;
- b. Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dibawah ini;

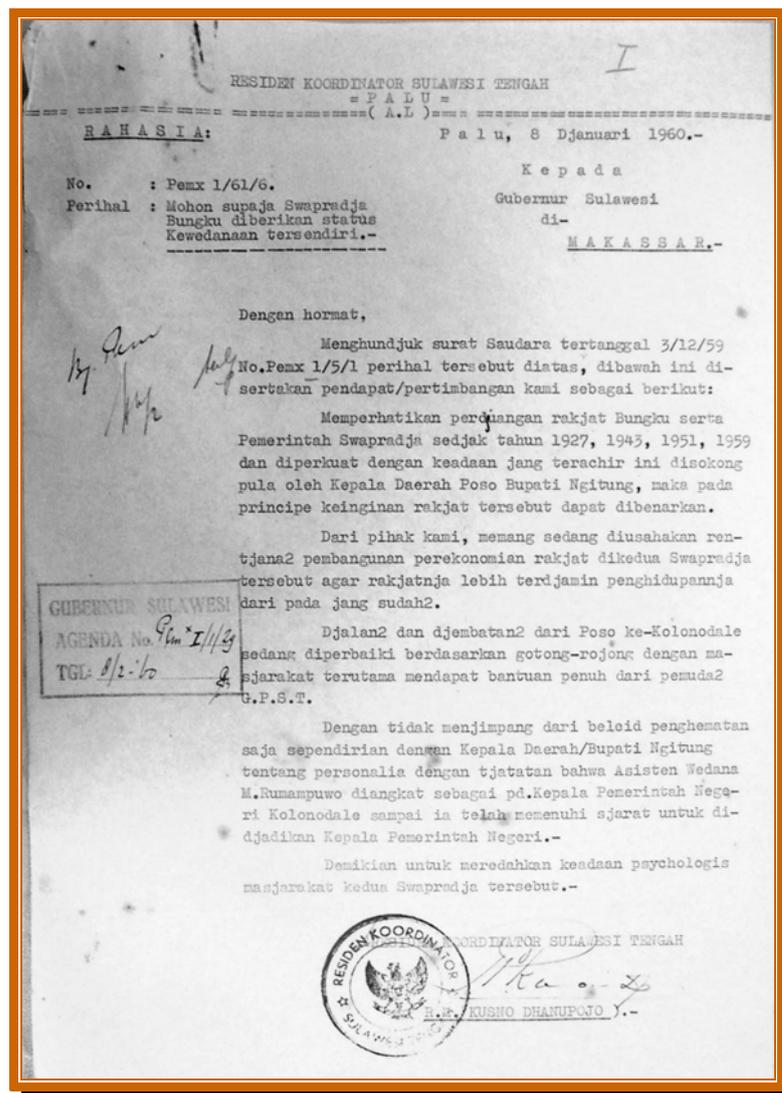
B. Membubarkan :

a. Daerah-daerah :

- Kota Manado yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1953 Jo. Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1954, (Lembaran Negara 1953 No.87 dan Lembaran Negara 1954 No.37);
- Kepulauan Sangihe dan Talaud yang dimaksud oleh Undang-undang R.I. No.44 tahun 1950 Jis Staatsblad 1946 No.143, Staatsblad 1948 No.73 dan Statuut Daerah dimaksud tanggal 20 Maret 1948;

3

Undang Undang No.29 Tahun 1959 tentang
pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi.
Sekcab UU No.316

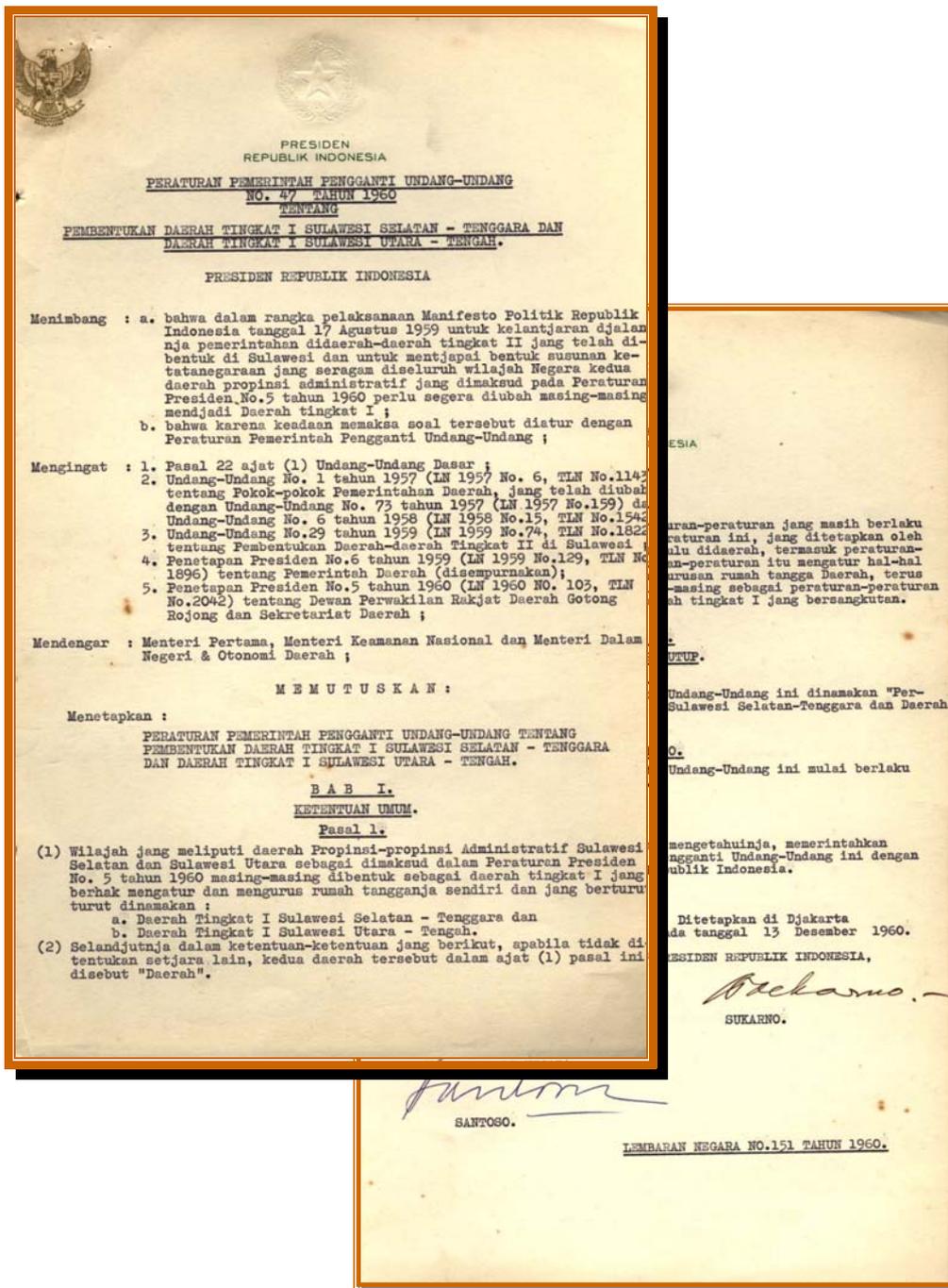


Surat dari Residen Koordinator Sulawesi Tengah di Palu kepada Gubernur Sulawesi di Makassar, 8 Januari 1960 tentang permohonan pemberian status kawedanaan kepada swapraja Bungku.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950 – 1960 No.196
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Schetskaart van een deel van Noord-en Midden-Celebes
(Peta Sulawesi Tengah dan Utara).
Daftar Arsip Kartografi No.2504/Blad I dan No.2505/Blad II
Topographische Inrichting, 1919



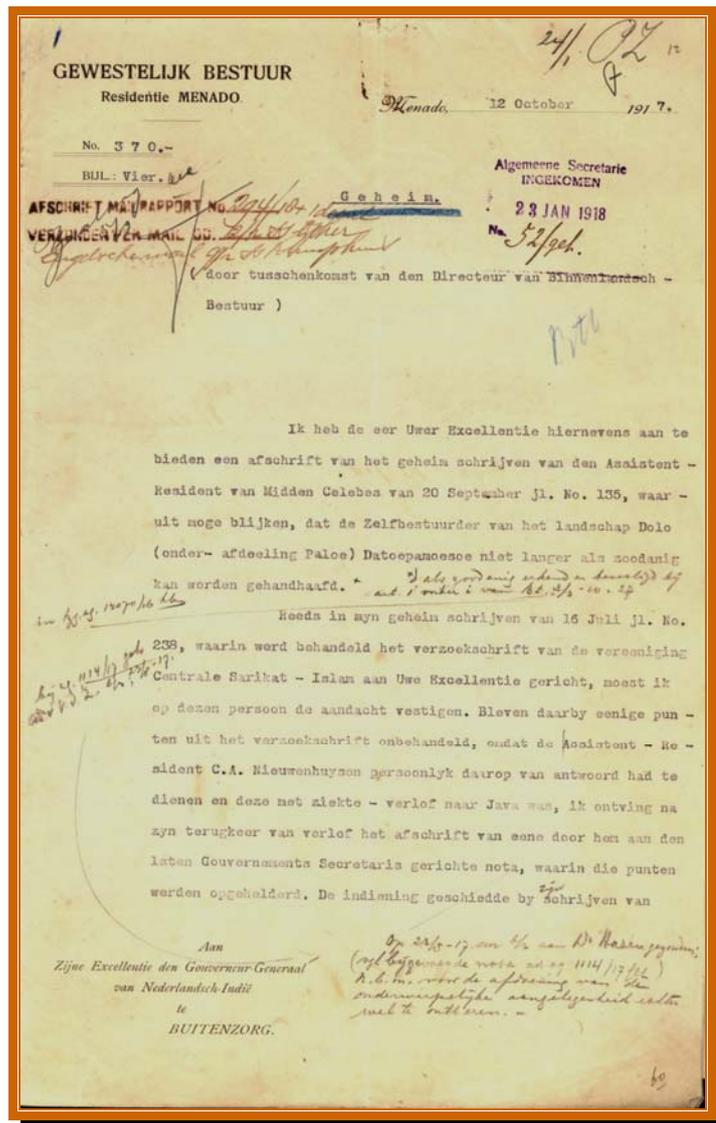
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.47
Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.
Sekkab Perpu No.77

D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Propinsi SULAWESI UTARA-TENGAH
(Ibukota MENADO).

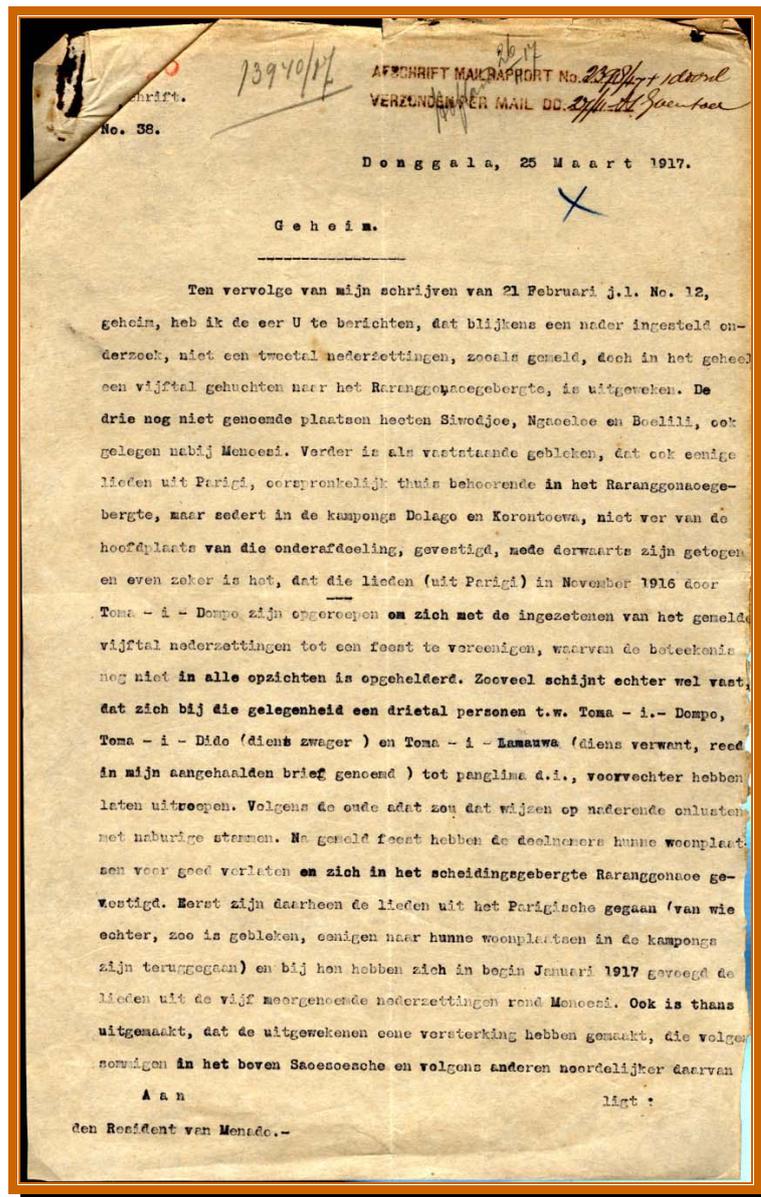
Keresidenan (Ibukota)	Kabupaten (Ibukota)	Kota-pradja	Kewedanan	Ketjamatan	Keterangan			
Sulawesi Utara (Menado)	1. Kepulauan Sangihe Talaut (Tuhana)		1. Sangi-Besar (Tuhana)	1. Kondahe 2. Manganitu 3. Tamako 4. Tabukan Utara 5. Tabukan Selatan	Semua swaprada telah dihapuskan sesuai dengan Undang2 No. 29 tahun 1959.			
			2. Siau-Tagulandang (Hulu-Siau)	1. Hulu-Siau 2. Ondong 3. Tagu-Landang				
			3. Talaud (Beo)	1. Salibabu-Kukuruan 2. Karakelang 3. Manusa				
			2. Minahasa (Tondano)	1. Tomohon	1. Menado 2. Tomohon 3. Tombariri			
				2. Tonsa	1. Airmadidi 2. Kauditan 3. Tatelu 4. Likupang 5. Situng			
			3. Bolang Mongondow (Kotamobagu)		Menado	3. Tolour	1. Tondano 2. Eris 3. Kakas 4. Rambaken	
						4. Kawangkoan	1. Kawangkoan 2. Langoan 3. Tumpa 4. Sander	
						5. Ratahan	1. Ratahan 2. Tombatu	
						6. Amurang	1. Tomesian 2. Tenga'	
						7. Motoling	1. Motoling 2. Tompasso	
			2. Kaidipang (Boroko)			1. Mongondow (Kopandakan)	1. Passi 2. Lolajan 3. Bolaang 4. Kotabunan 5. Dumoga 6. Bolang Uki	
						2. Kaidipang	1. Bintauna 2. Bolang Itang 3. Kaidipang	

Daftar pembagian daerah administrasi Provinsi Sulawesi Utara – Tengah, 1961.
Inventaris Marzuki Arifin No.123

Politik

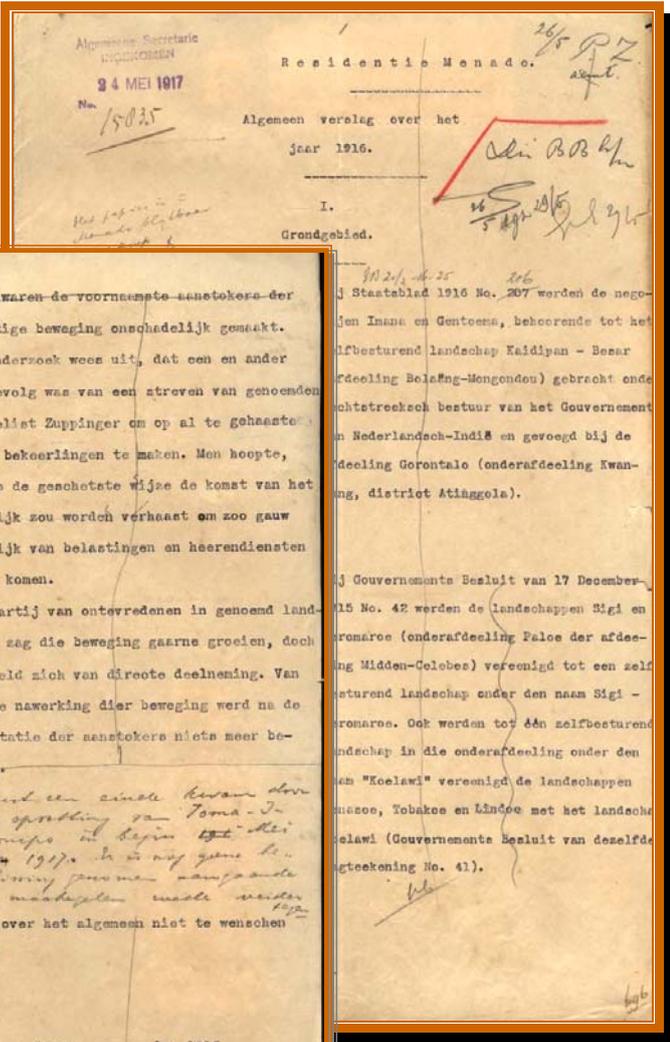


Surat permohonan dari Datu Pamoeso,
Penguasa Daerah Dolo, Posso untuk bantuan keuangan.
Yang bersangkutan dihukum buang selama 9 tahun di Ternate
sejak bulan Agustus 1918.
Besluit 30 Desember 1920 no. 123



Laporan dari Asisten Residen Sulawesi Tengah,
25 Maret 1917 tentang kerusuhan yang terjadi di Palu
dilakukan oleh Toma I Dampo dan kawan-kawan.

Besluit 7 November 1917 no. 21



Roma - J. Bongs ook 7
 dwars omringd der uit. genen waren de voornaamste aanstokers der
 geslender werd deelg. onrustige beweging onschadelijk gemaakt.
 worden, die p... Het onderzoek wees uit, dat een en ander
 feest, behoudt [sedert ons het gevolg was van een streven van genoemde
 tempelen in het Paludal Evangelist Zuppinger om op al te gehaaste
 met meer... wijze bekeerlingen te maken. Men hoopte,
 de... dat op de geschetste wijze de komst van het
 volgens de adat... Goddriek zou worden verhaast en zoo gauw
 worden verzet met weder mogelijk van belastingen en heerdiensten
 bezettingen werd ge. af te komen.
 opend met het doerstaan Een partij van ontevredenen in genoemd land-
 ten een slaaf, ingeteld schap zag die beweging gaarne groeien, doch
 door een uit een... ontkield zich van directe deelneming. Van
 otan gesmeerd... eenige nawerking dier beweging werd na de
 na het... arrestatie der aanstokers niets meer be-
 houw, werd... merkt.
 in het... end een einde kwam door
 met... de opvolging van Toma - J.
 in het Paludal... Bongs in begin...
 met... 1917. In...
 de... slimmig...
 de... de...
 de... de...

Staten
 b. Veiligheid van persoon en goedLiet over het algemeen niet te wenschen
 over.
 c. Inlandsche vorsten, hoofden en amte-
 naren.
 Mutatiën onder de hoogere rangenIn de plaats van den overleden Djegegoe

Laporan mengenai keadaan politik di Karasidenan Manado Tahun 1916 termasuk catatan tentang jumlah kriminalitas, April 1917.

Alg. Verslag Manado 1893



Komandan Operasi Insjaf, Overste Roekminto,
meninjau rumah penjara Palu, April 1958.
Kempen 580408 SS 20

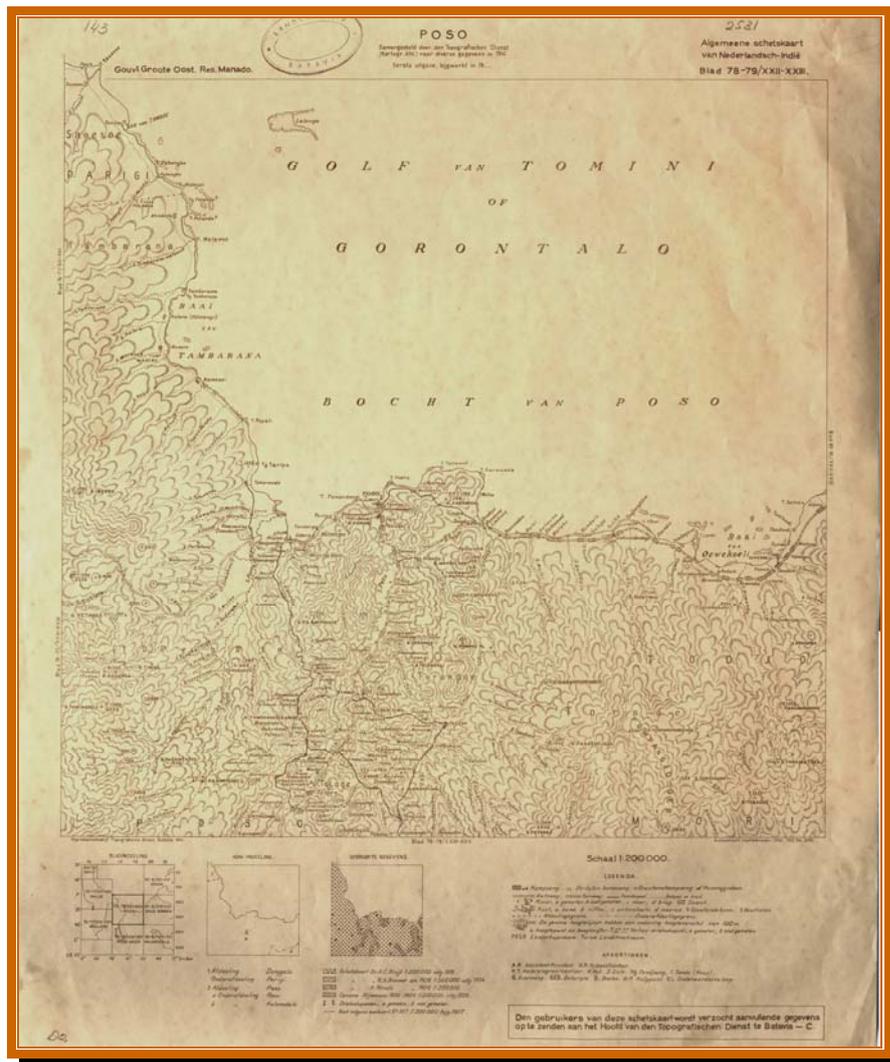


Anggota-anggota Pemuda Revolusioner dari Permesta
yang ditawan di penjara Palu.
Kempen 580408 SS 32



Overste Roekminto bertanya jawab dengan para tawanan
Permesta di Palu, 8 April 1958.

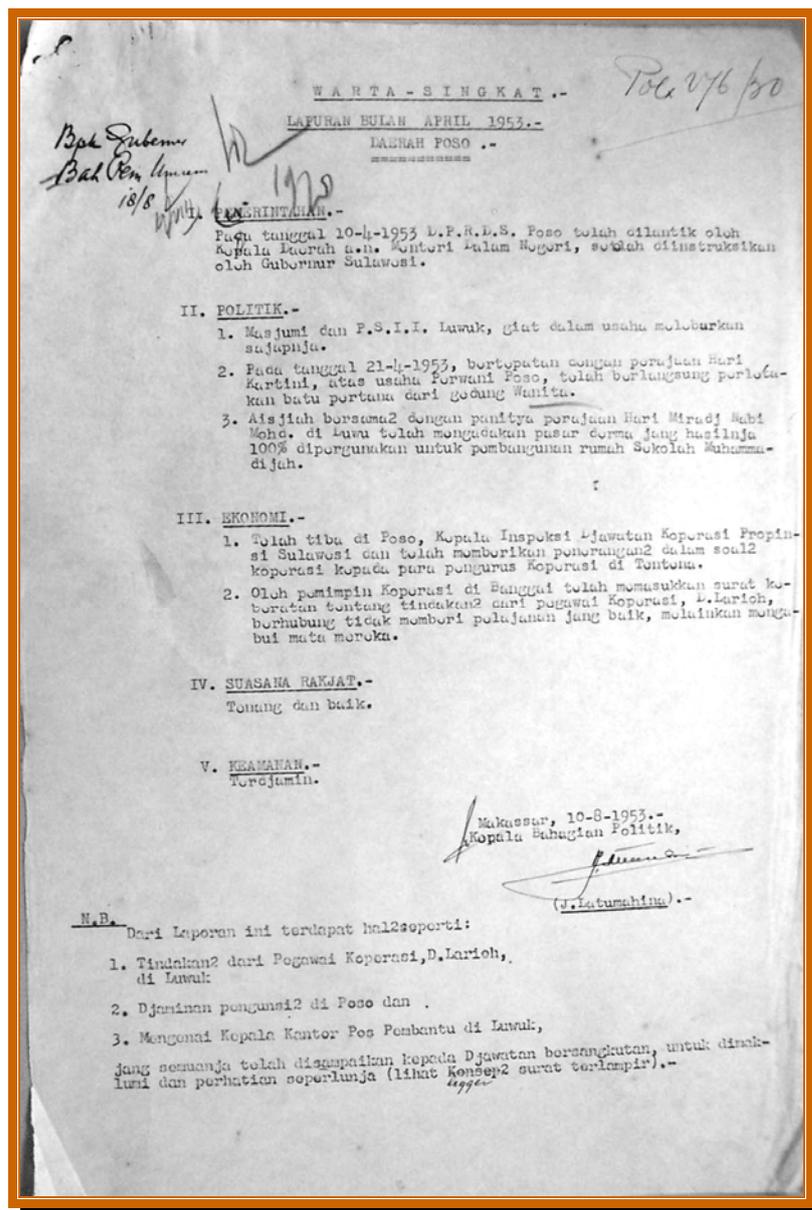
Kempen 580408 SS 26



Peta Poso.

Daftar Arsip Kartografi (Peta Indonesia 1913 – 1946)
 No.2531/Blad 78 – 79/XXII – XXIII/143





Laporan bulanan Kepala Bagian Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi tentang daerah Poso bulan April 1953 yang berkaitan dengan kondisi pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara-
Provinsi Sulawesi Selatan No.644

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

ANGKATAN DARAT
TERRITORIUM VII
RES. INF. 24. P.D.M. 244.-

Palu, 24 April 1954.-

No. : 802/244/547-C
Sifat: R a h a s i a
Lamp.: satu
Pokok: Salinan surat T.I.I. Terr.IV kepada
Wk.C.I.123 di Palu.-

K e p a d a
Jth.Komd. R.I.24
Kep.Bag. I.R.1.24
Kep.Bag. V.R.1.24
Kmd.Sub.Sector Palu
Kmd.Sub.Det. C.P.M.Palu
Kmd. Sector 45 Posco.-

===== i s i - s u r a t =====

1. Dengan hormat dikirim salinan surat dari Kepala Polisi Wilayah Palu, dan dengan singkat dipersilahkan membuatjanja dan mempelajarinja, untuk bahan seperlunja.

P.D.M. 244 Palu

Kepala,
ttd
(E.Sundah/Lts).-
Nrp. 15964

TEMBUSAN:

1. Kepala DaErah Donggala di Palu
2. d.l.l.

===== SALINAN =====

POLISI NEGARA
KANTOR WILAJAH PALU
BAHAGIAN DIMAS SECURITY

Palu, 24 April 1954

No. : Pol.4/4/3/Ds.Rah.
Lamp.: dua
Pokok: Salinan surat T.I.I. Terr.IV
Kom.Pas.Has.
Comando Operasi D" I.I."

Dengan hormat, dikirim kepada Sdr.salinan surat T.I.I.Terr. IV Kom.Pas.Has.Comando Operasi D" I.I." dalam rangkap dua dengan singkat dipersilahkan Saudara membuatjanja, dengan keterangan bahwa surat asli dipungut oleh isteri ap.II E.Nowilos di muka rumah bekas tuan Pih-er jang kini didiami Polisi, dengan pendjelasan bahwa surat sematjan ini sudah beberapa kali dipungut di-Pos2 Polisi.-
Penjelidikan dalam hal ini dipergiatkan dan hasilnja akan segera dikabarkan.-
Ditambah bahwa surat ini memang sengadja dibuat dan dibuang dimana tempat kediaman Polisi untuk mengemparkan.-

Kepala Polisi Wilayah Palu,
ttd
(A.Mamihutu).-
Pip. II.-

Dikirim kepada :

1. Kmd.Pel.I. Moberiggie
2. Kmd.Pel.IV Moberig Cie 5153 Tawaali
3. Kep. Polisi Wilayah Parigi
4. Kep. Polisi Sul. Wilayah Donggala
5. Kepala Pemerintah Negeri di Palu
6. Kepala Pemerintah Negeri Donggala
7. Kmd. P.D.M. Palu
untuk diketahui dan perlunja.-

Salinan jang sama
ttd,
(E.Sundah).-

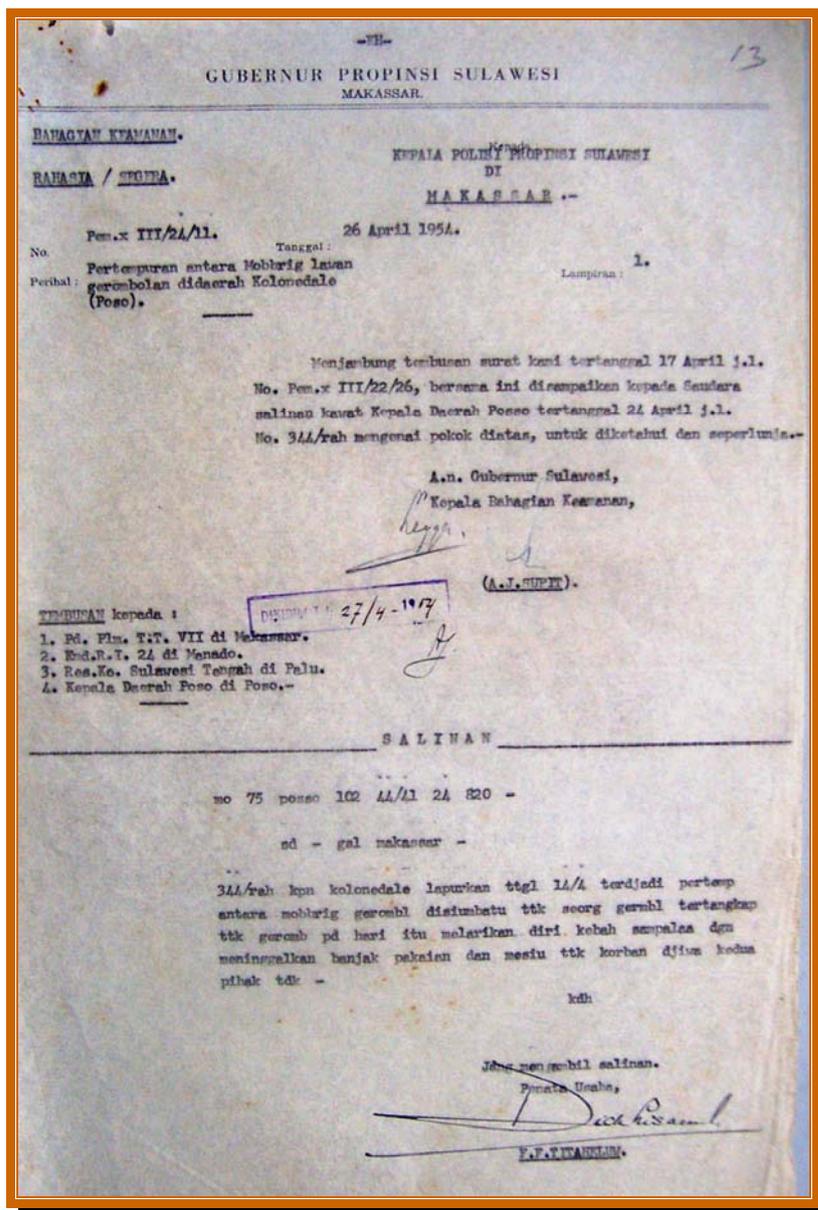
Pada salinan jang sama pula,
pada Kantor Residen Koordinator Sulawesi Tengah
Sub Bagian Arsip/Spesial pada ktr.tsb.

(S.Janri Marakete).-

Surat dari Polisi Negara Kantor Wilayah Palu tanggal 24 April 1954 tentang strategi operasi Tentara Islam Indonesia (TII) Comando Operasi D "II" di sekitar daerah Sulawesi Tengah.

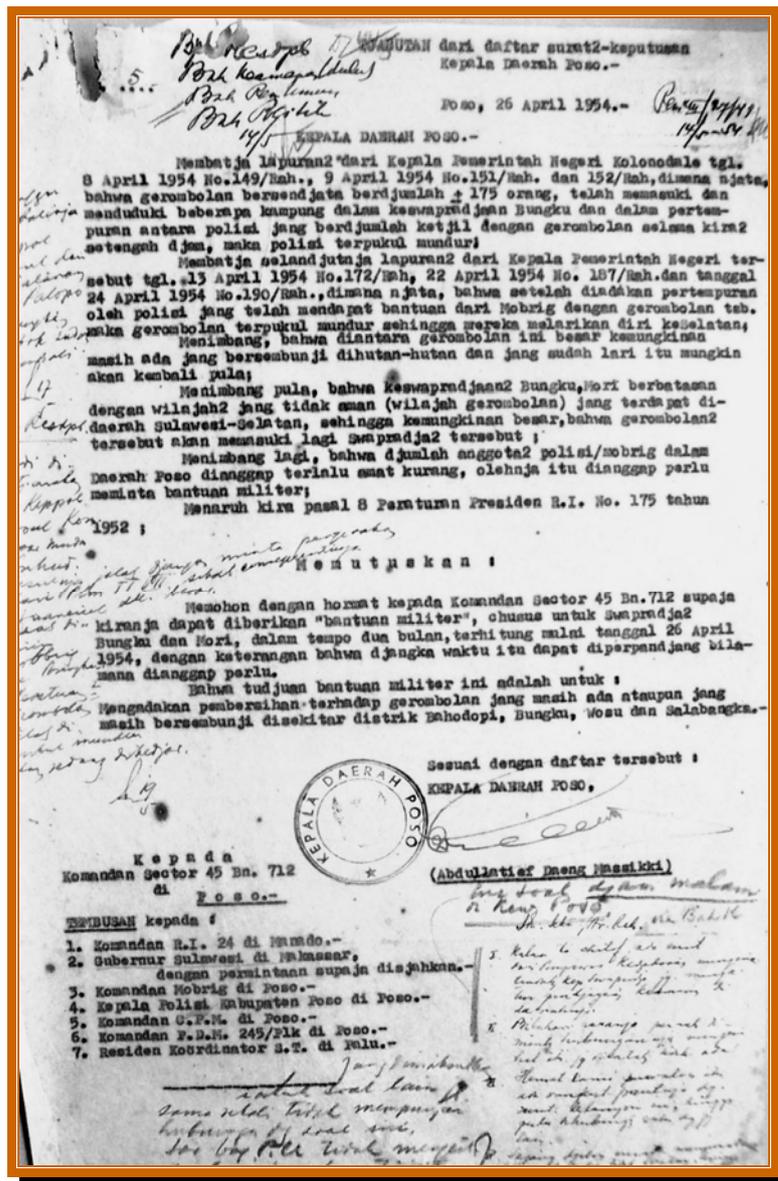
Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara –
Provinsi Sulawesi Selatan No.539

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



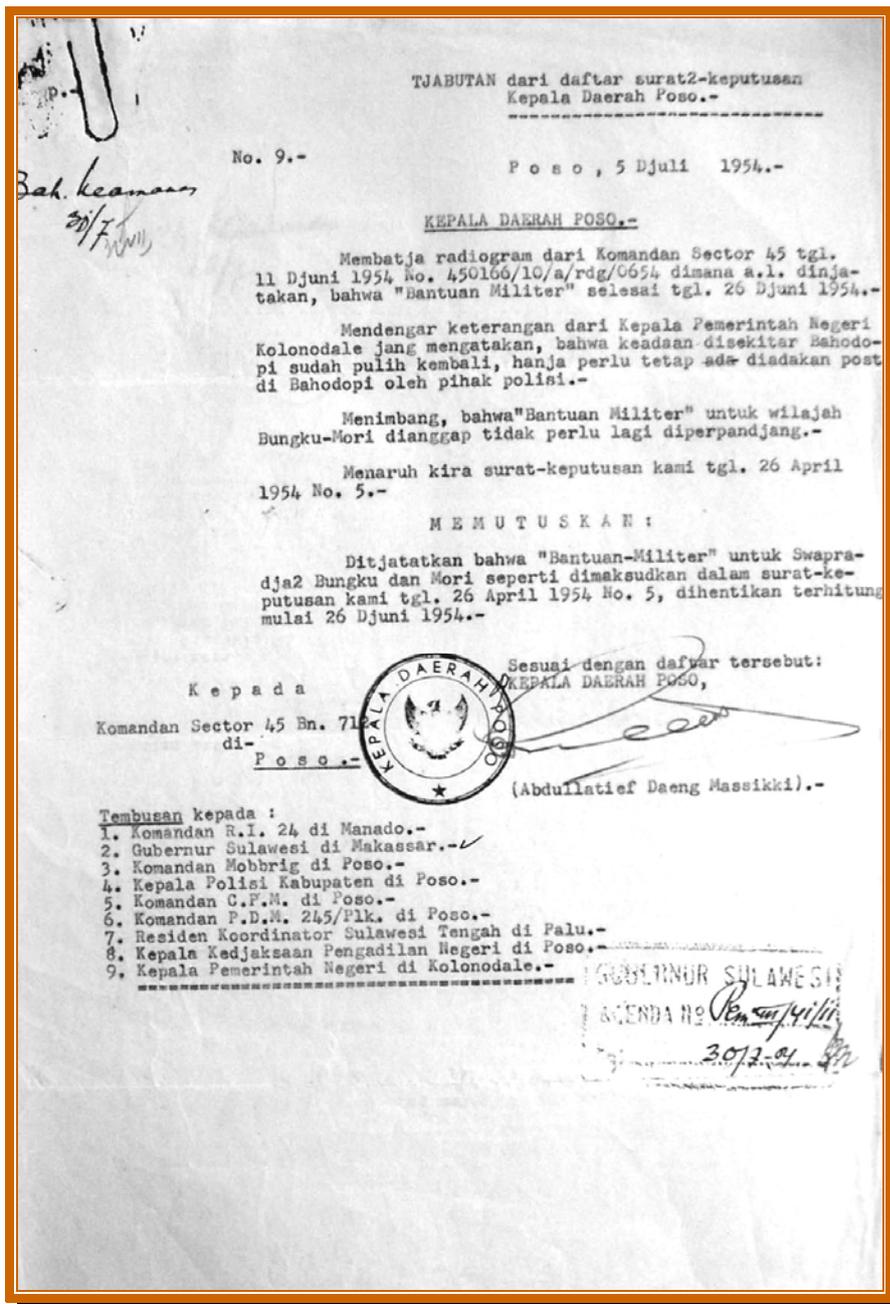
Salinan kawat dari Kabag Keamanan Provinsi Sulawesi kepada Kepala Polisi Provinsi Sulawesi di Makassar tanggal 26 April 1954 tentang kontak senjata antara satuan Brigade Mobile dengan gerombolan bersenjata di Kolonedale (Poso).

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950 – 1960 No.273
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Surat Keputusan Kepala Daerah Poso No.5/26 April 1954 tentang permohonan bantuan militer kepada Komandan Sector 5 Bn.712., bantuan militer itu dimaksudkan untuk menumpas gerakan gerombolan pengacau yang masih bersembunyi di sekitar distrik Bahodopi, Bungku, Wosu dan Salabangka.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Surat Keputusan Kepala Daerah Poso No.9/5 Juli 1954 tentang penghentian bantuan militer untuk daerah swapraja Bungku dan Mori terhitung sejak tanggal 26 Juni 1954.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten : P o s s o .

Tahun: 1954.

Kewedanaan: KOLONODALE.

Bulan: OKTOBER.

L a p o r a n penting tentang kejadian2 dalam
wilayah Kewedanaan Kolonodale.-

Pada tanggal 15 Oktober 1954, gerombolan pengatjsu,
yang menamakan dirinja T.I.I., sebanyak 19 orang
anteranja 4 orang bersendjata api, telah memasuki
kampung Behodopi (Bungku Sel, ten).-
Menurut penjelidikan, maksud kedatangan mereka ia-
lah untuk mendapatkan keperluan hari2 seperti:
garam, sabun dan lain2.
Mereka ini bertinggel selama 2 hari ditempat itu
dan pada tanggal 17 Oktober 1954, kembali kedju-
rusan Epe/Sampala.-
Pada perdjelanan kembali, disuatu tempat kira2 7 KM
dari Bahodopi, mereka telah membakar demar kepunja-
an seorang penduduk Behodopi sebanyak 30 KG dan
merusak (waktu itu pemilik pondok tidak ada di-
tempat) 5 lembar kain palekat, wang tunai Rp.50.-
(lima puluh rupiah), dll. slat masak.-
Kerugian ditaksir Rp.500.- (limaratus rupiah).-

Satu regu Polisi Perintis dari Kolonodale segera
didatangkan, akan tetapi setibanje di Behodopi,
gerombolan tek ada lagi.-

Ditambahkan selanjutnja bahwa selama gerombolan
pengatjsu berada di Behodopi, tidak terdjadi pe-
rampoken2 atau penganiajaan2 terhadap rakjst.-

Kolonodale, 25 Pebruari 1955.-

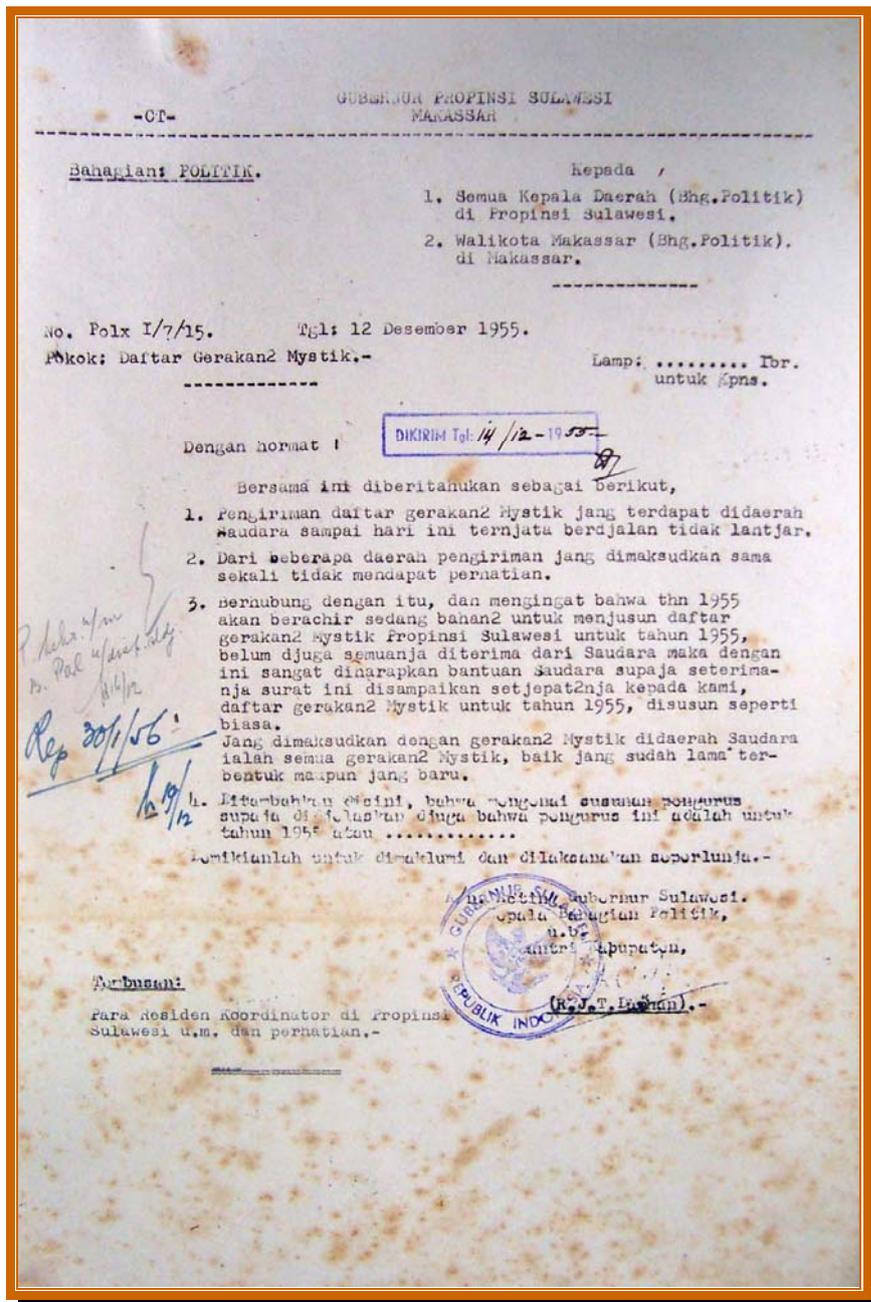
A/n Kepala Pemerintah Negeri,
Asisten-Wedana dpb,



W.L. Tolasa.

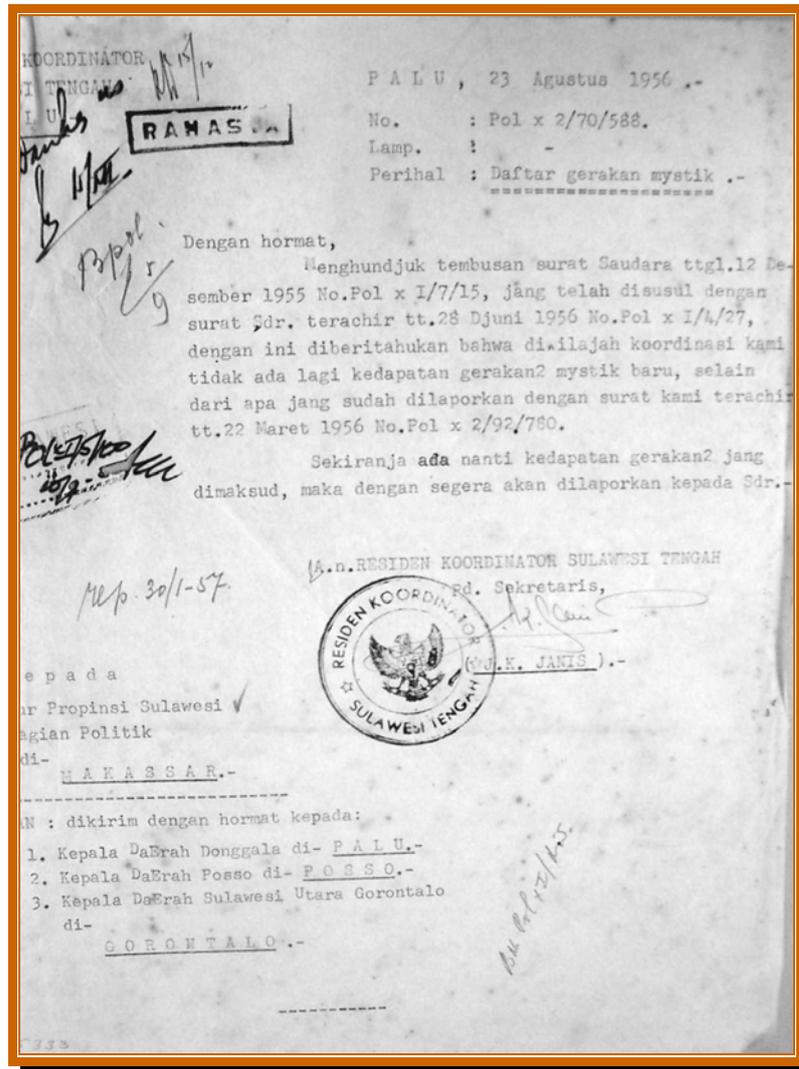
Laporan Pemerintah Negeri Kolonodale kabupaten Poso
tanggal 25 Pebruari 1955 tentang kekacauan yang dilakukan
oleh gerombolan Tentara Islam Indonesia.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



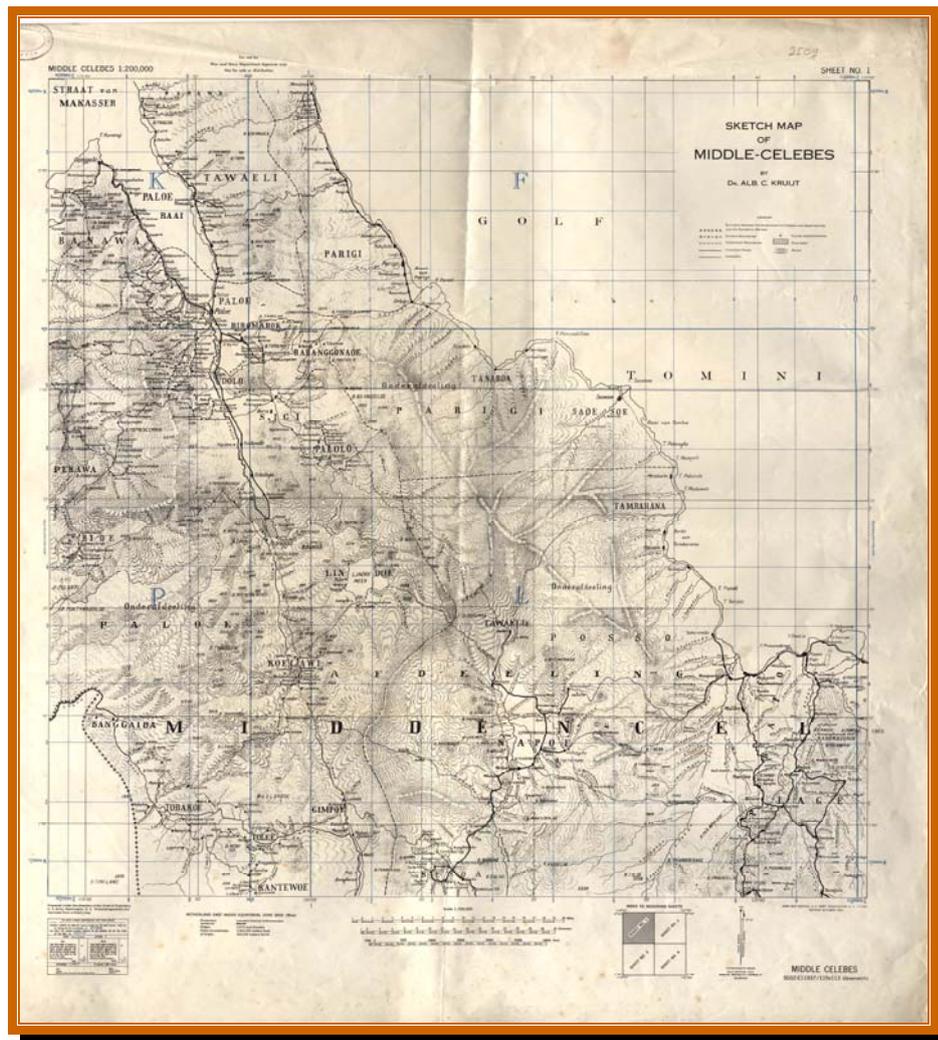
Surat dari Pejabat Gubernur Sulawesi kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi, tanggal 12 Desember 1955 tentang permintaan pengiriman daftar gerakan mistik yang ada di masing-masing daerah.

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara-
Provinsi Sulawesi Selatan No.733
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

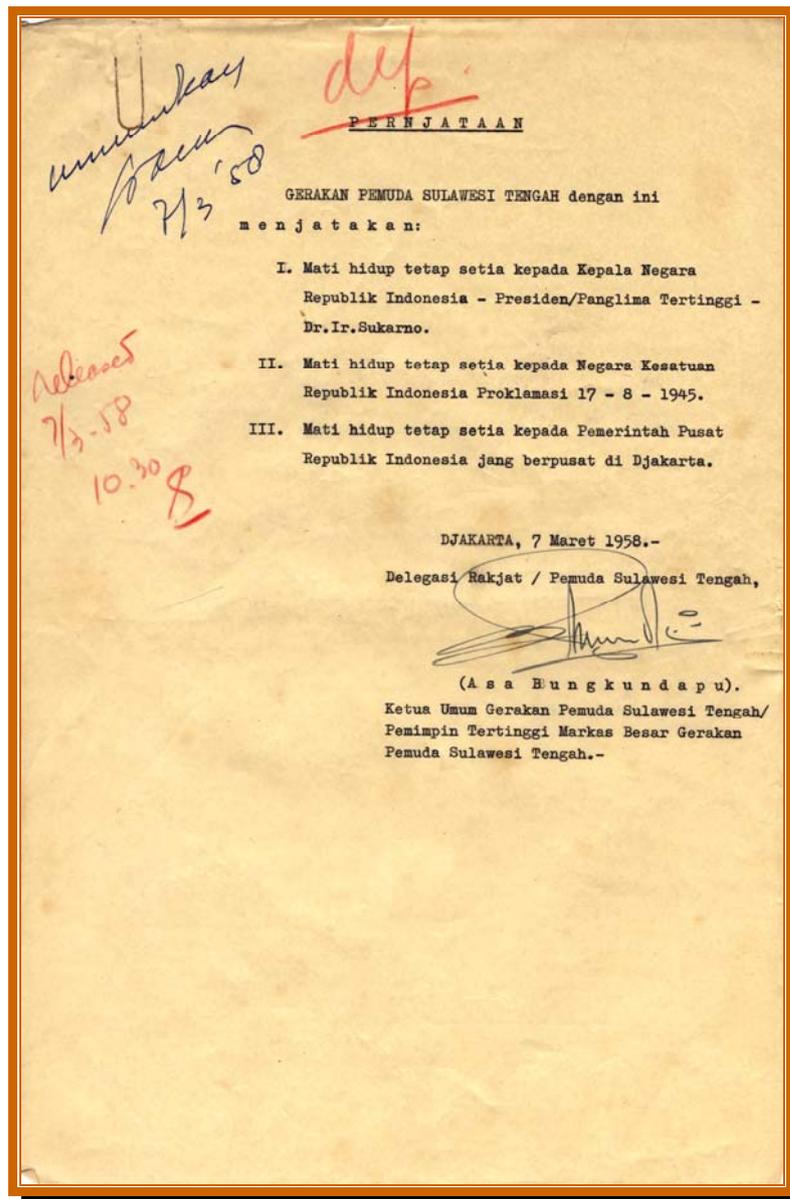


Surat dari Residen Koordinator Sulawesi Tengah di Palu kepada Gubernur Provinsi Sulawesi di Makassar tanggal 23 Agustus 1956 tentang tidak ditemukannya gerakan mistik baru di Sulawesi Tengah.

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulselra)-
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) No.733
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sketch map of Middle – Celebes (Sulawesi Tengah).
Daftar Arsip Kartografi No.2509/Sheet No.7/141
Army Map Service US Army Washington D.C.111301
Reprint October 1942



Pernyataan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah tanggal 7 Maret 1958 yang berisi kalimat tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabinet Presiden No.823

Kunjungan Presiden/ Gubernur



Perjalanan Presiden Soekarno ke Maluku dan Sulawesi
10–26 Nopember 1951: dengan naik perahu rombongan
Presiden Soekarno menuju pantai di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 7



Gadis-gadis Poso dengan berpakaian adat menyambut Presiden Soekarno waktu tiba di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 30



Rapat raksasa di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 4



Pemandangan rapat raksasa di Poso.
Kempen 511121 SS 21



Presiden Soekarno di tengah-tengah masyarakat Poso
yang berpakaian adat.
Kempen 511121 SS 8



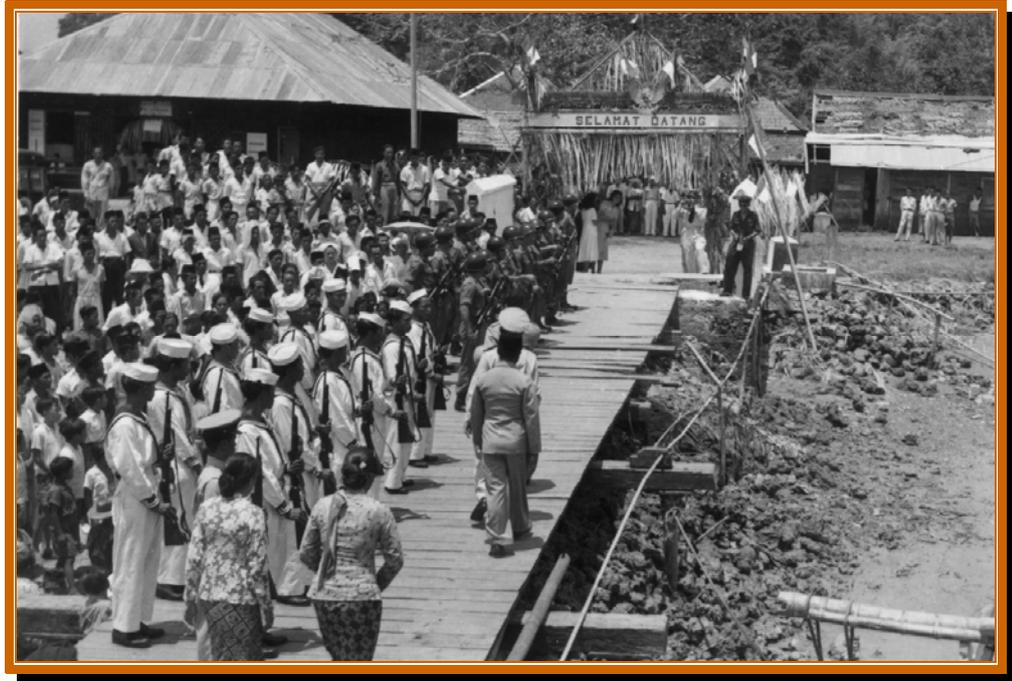
Presiden Soekarno dengan para penari adat di Poso.
Kempen 511121 SS 15



Upacara peresmian Tugu Kemerdekaan di Poso,
Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga.
Kempen 511121 SS 23



Upacara peresmian Tugu Kemerdekaan di Poso,
Gubernur Sudiro meletakkan karangan bunga.
Kempen 511121 SS 25

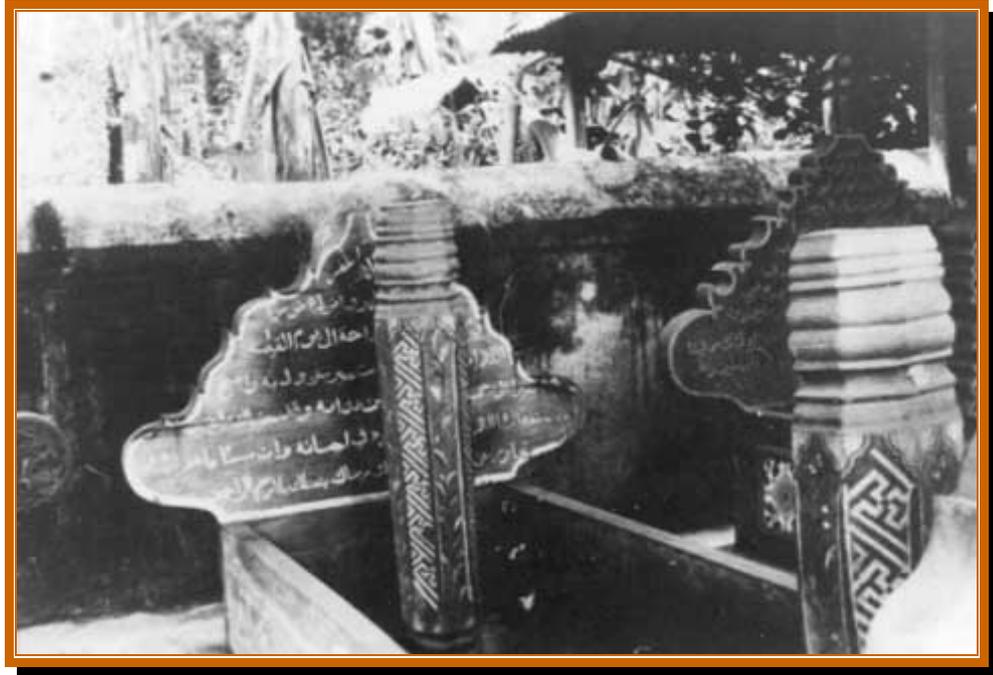


Barisan Penghormatan dari Angkatan Laut dan Polisi
menyambut kedatangan Gubernur Sudiro di Pelabuhan Toli-Toli.
Kempen Provinsi Sulawesi M. 6240

Bangunan



Benteng Sumur Kopi, Palu. 1920.
KIT No. 145/86



Nisan dan makam Raja Gowa terakhir di areal Masjid Donggala.
KIT No. 815/62



Gedung Studio Radio Republik Indonesia Lokal di Donggala,
Palu.

Kempen 580409 SS 2-1



Kantor Kas Perbendaharaan Negara di Donggala.
Kempen 580409 SS 2-2



Kantor Agraria Kawedanaan Donggala dan Kantor Panitia Aksi
Pembebasan Irian Barat, Donggala.
Kempen 580409 SS 2-3



Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala yang hancur akibat bom Permesta dilihat dari sebelah dalam.

Kempen 580530 SS 6

Sarana dan Prasarana Transportasi



Peta Paloe (Palu)
Daftar Arsip Kartografi No.2527/Blad 76-77/XXI-XXII/143
Reproductiebedrijf Topografische Dienst, Batavia 1941



Jembatan penyeberangan, Palu, 1920.
KIT No. 145/072



Orang-orang yang sedang naik perahu di Donggala.
KIT No. 705/54



Pemandangan kota Palu yang sudah dibebaskan dari Permesta,
kendaraan Cikar melakukan tugasnya seperti sedia kala.

Kempen 580411 SS 1



Pelabuhan udara Masowa sekitar 12 Km dari Palu.
Kempen 580408 SS 10



Bomber AURI dengan Pelabuhan Udara Masowa di Palu,
8 April 1958.

Kempen 580408 SS 7



Memperbaiki hubungan telepon di Palu.
Kempen 580408 SS 34



Sado-sado sedang menunggu penumpang di Pasar Palu,
11 April 1958.

Kempen 580411 SS 4

Perekonomian/ Perdagangan

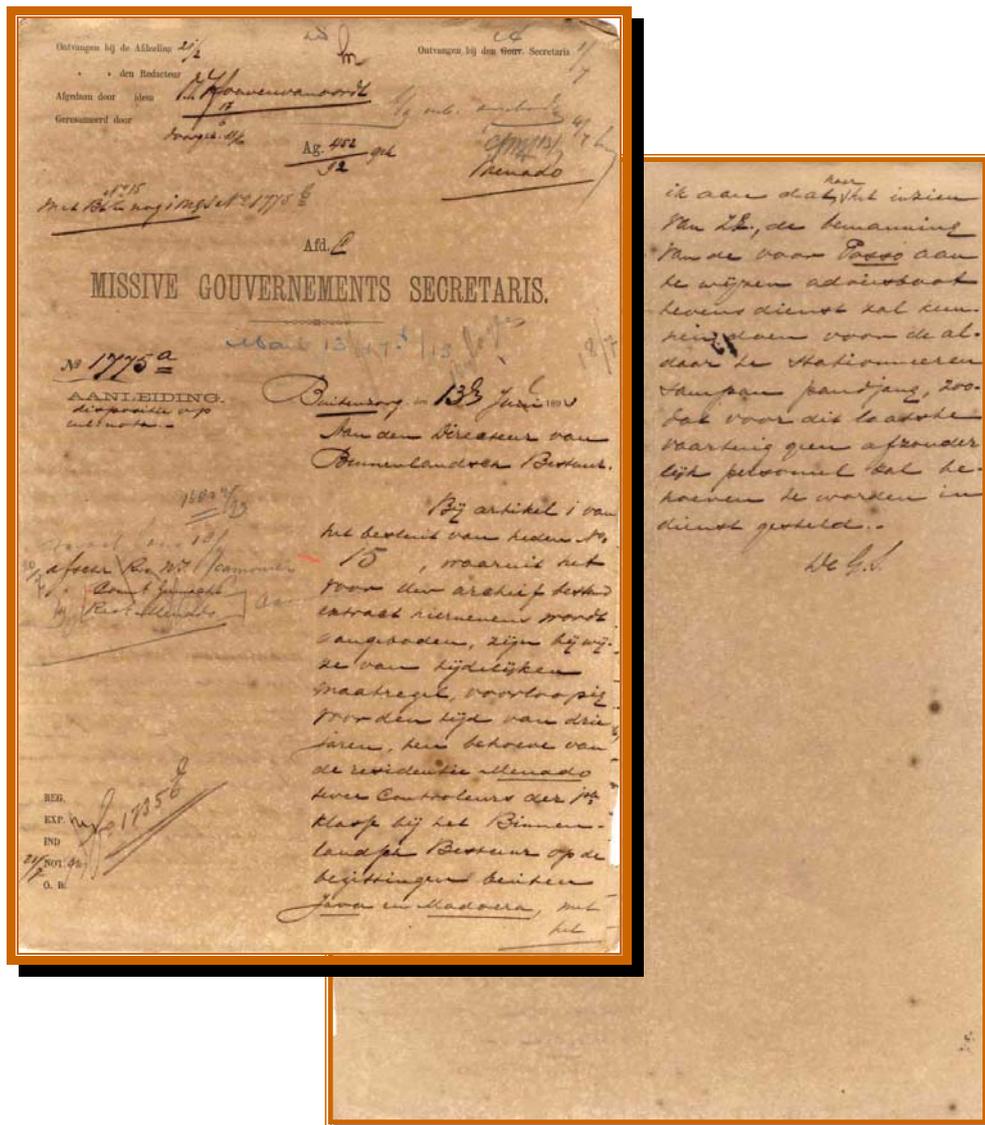
4.

en dwingen. Daar een nijnreancee te Rato
 beelaad nog een bevaender berwaer u. l. de natij-
 heid van den zeer waarden Affoerschen Stam Co-
nang, vastwaerts in t binnenland van Rato
 welke stam reets tot Banggae getekend wort
 en die nog gan 10 tal j. l. gelken geheel Rato,
 dat vroeger een melvarende streek was, loep niet
 gemocht.

2: Poso. Als lantschap wort door Tolage
 Alfuren bevaend, die door hun weestamen
 karakter uitkomsten. Met stechte voor der stam,
 hoopen, kaarsenat, welke het meest voortdij-
 waven, is het in 1888 voor het eerst gelukt in
 contact te komen en een contract van souve-
 reiniteit erkenning te erlangen. Als andere naam
 het meer van Poso genechte stamhoopen heten
 deeltjes meten dat zij kaartoec ewe. v. angengen
 staren op naamwaerd, dat t Commerciële
 niet door god te Poso vestigde en hun bevalten
 wilde tegen de aanvallen van de meer oorlog
 zuchtige stammen, die zich westwaerts van
 de Thorinier ophouden. Ik weet niet of deze
 bevaenderheid destijds door W. K. L. G. voorganger
 van de Regeering is medegedelt. Nog uitscher
 bevaenderheid amblendar officieel het meer, zoo
 dat omtegen de onderlinge verhandelingen en reek-
 ken der verschillende hoopen daar zoo goed als niet
 bekend is. Wat evenwel zeker is, is dat de stam,
 met Tolabalae, Tokolaki, Tonggo, Tobada ewe.
 als laatste en wrede koppenenellers bekend dan

oftachten en oorlogen
 zijn en waaronder
 in Poso te lijden hebben.
 te Poso vestigde zulten
 omdat zij een heilige
 wat compania heet
 agne, zij ten, tot in
 voortdij. Gelukkig
 vree wapenen. Deunt
 het gevoelden tegen
 zijst die een Commer.
 datolijk persoonlijk
 valtes het vanwaar
 voor Europeesche
 nits onbeschaafde
 halische gald, diggers
 heel uitteken met
 deze, die wijst zoo
 in hunne bijelen.
 ten op ruim bijge
 hipe zekerheid is dan
 Gouvernament zich
 maecielike expeditie
 aflang in onze tijde
 ten is.
 rijst kan ik niets met
 ab mij de lantschapen
 daar niet vordende gekend zijn. Met ik even
 wel op mijnne jingele reis vordent den rijkhe
 slier der Abelkangie verman doel mij de ver
 vordening

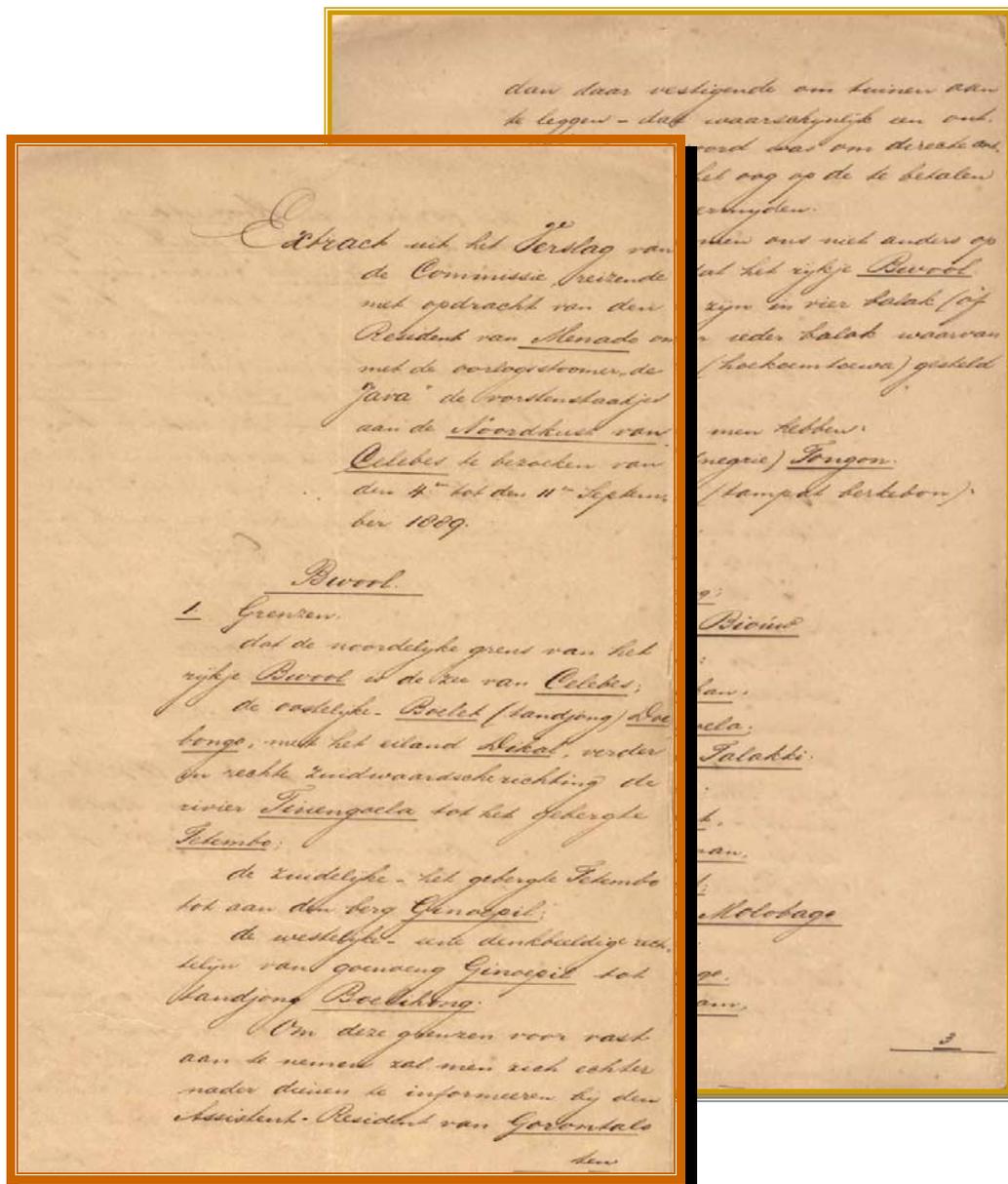
Laporan Asisten Residen Menado tentang penduduk Poso asli,
 yang disebut Tolage Alfuren, 25 Maret 1891 no. Lr.K.
 MGS 21 Juli 1891 no. 148 Geheim
 Besluit 13 Juli 1893 no. 15



Surat Sekretaris Gubernur tentang penetapan Poso sebagai lalu lintas perdagangan yang penting di daerah Teluk Tomini dan Bwool/Buol sebagai tempat singgah di pantai utara Sulawesi

MGS 13 Juli 1893 no. 1775 a

Besluit 13 Juli 1893 no. 15



Ringkasan dari laporan perjalanan tahun 1889 mengenai keadaan kerajaan-kerajaan di Pantai Utara, antara lain tentang Bwool/Buol, sebagai bagian dari berkas mengenai kontrak politik baru dengan Bolaang Mongondo dan wilayah lain di pantai utara Sulawesi. Oktober 1891

Kommissorial 14 Oktober 1893 no. 18399

Besluit 13 Juli 1893 no. 15



Peta Toli-Toli.

Daftar Arsip Kartografi, No.2529/Blad 78-79/XV – XVI/143
 Reprodutiebedrijf Topografische Dienst, Batavia 1940



Toli-Toli, daerah kopra di Sulawesi.
KIT No. 0630/043



Perempuan di pasar di Palu, 7 Oktober 1924.
KIT No. 124/69



Keadaan di Pasar Palu yang telah dibebaskan dari Permesta,
jual beli berjalan lancar. 12 April 1958.

Kempen 580412 SS 3



Orang-orang telah mulai berjualan seperti biasa di Pasar Palu,
setelah peristiwa Permesta, 12 April 1958.

Kempen 580412 SS 1



Tambang emas di Paleleh.
KIT No. 486/76

Kerajinan



Rok/celemek yang dipakai untuk bekerja di dapur
KIT No. 690/4.



Tikar yang dipakai untuk menutupi kepala dari siraman air hujan,
KIT No. 691/50



Motif kain panjang tutup kepala dengan junbai-jumbai
dari Galumpang.

KIT No. 714/10



Motif kain katun cap ikat pinggang "Kain Sarita",
kain tenun ikat dari Sigi dan Bada.

KIT No. 728/84



Topeng dari batu ditemukan dalam periuk
penyimpanan abu jenazah di Napoe.
KIT No. 815/72

Pemukiman



Rumah administrateur di Palu, 1920.
KIT No. 0145/82



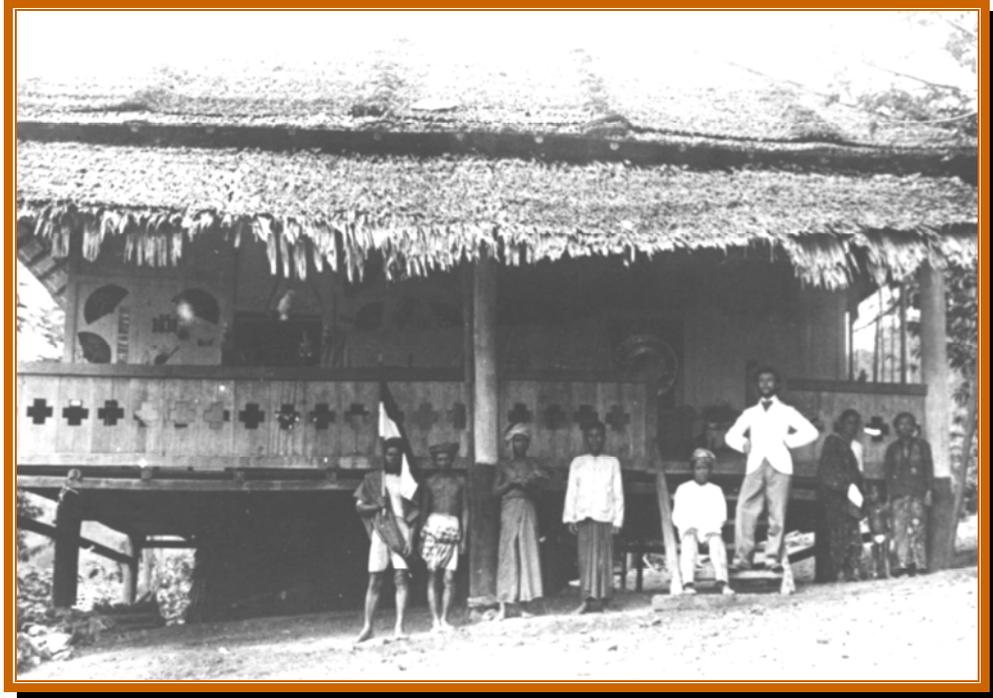
Rumah panggung di Bwool/Buol.
KIT No. 831/3



Rumah panggung beratap sirap di desa Tapekalo.
KIT No. 832/4



Rumah-rumah penduduk di Donggala.
KIT No. 0832/067



Rumah panggung kayu beratap rumbia Trifin Mowa, Donggala.
KIT No. 9832/69



Rumah penduduk di Lamba, distrik Napoe.
KIT No. 0834/83



Rumah penduduk di Donggala, Sulawesi Tengah, April 1958.
Kempen 580410 SS 1-2

Agama dan Pendidikan

d. Evangelisatie

De Limbotta werdt
 de Her Kuittha en de
Poso de Her Kreegt,
 beiden van het Nederlandsche
Verdeling-gemaatschap te
Rotterdam.

Men heeft gegrande hoop
 dat de Evangelisatie in het
 landschap Poso (Boek
 van Toemeri) bevoord
 door Mispaero, gunstige
 resultaten zal opleveren.
 Of zelfs ook het geval
 zal zijn met het werk
 te Limbotta is te betwij
 velen. Intusschen moet
 niet met het oog worden
 verloren, dat men nu
 slechts kort een aanvang
 heeft gemaakt met de
Evangelisatie in de
 afdeling Corantala.

III Politieke toestand.

a. Soornaamste gebeur.
betreffende op politiek gebied.
 i. in de onder bevolking
 bestaande gebraakte straken.

Gedurende het verloop
 jaar

Bagian dari Laporan politik Karesiden Manado, 1893 mengenai
 evangelisasi (penyebaran agama kristen) di Poso
 Alg.Verslag Manado No.4887, 9 Maret 1893

USUL PROYEK PEMBINAAN WARGA GEREJA
SYNODE GEREJA PROTESTAN INDONESIA
DI DONGGALA (GPID)

I. Latar belakang.

Synode GPID yang berkedudukan di kota Palu ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah pelayanan Kabupaten Donggala merupakan salah satu Gereja yang muda, diresmikan pada tanggal 4 April 1965 dan menjadi anggota DGI pada tahun 1971. Gereja ini tumbuh dan berkembang dari hasil pelayan/pekabaran Injil Synode GMIM. Bertahun-tahun sebelumnya pekabaran-pekabaran Injil dari Synode GMIM datang hanya untuk melayani Jemaat-jemaat berasal dari Minahasa dan Sangir Talud yang bekerja di daerah ini.

Lama-kelamaan pekabaran-pekabaran Injil ini mulai memasuki pedalaman-pedalaman dan berhasil membaptiskan dan membentuk Jemaat dari penduduk lokal.

Jemaat-jemaat ini kemudian diperkembangkan dan beberapa pemuda di antaranya dikirim untuk mengikuti pendidikan Teologia di Tomohon dan mereka inilah yang melanjutkan pelayanan di Kabupaten Donggala.

Tiga tahun permulaan sesudah Synode GPID diresmikan pelayanan di GPID masih dilakukan oleh Pendeta-pendeta dari GMIM. Setelah 3 tahun ini selesai maka Pendeta-pendeta ini ditarik oleh GMIM kemudian mengalihkan pelayanan kepada Pendeta-pendeta setempat. Panggilan ini sebenarnya merupakan beban berat bagi Synode GPID karena menghadapi situasi Jemaat yang masih sangat terkebelakang, adanya transmigrasi dari Bali dan imigrasi penduduk dari daerah lain serta masih adanya kelompok-kelompok suku yang hidup terasing di pedalaman dan belum sempat dijangkau oleh pelayanan umum di samping menghadapi keterbatasan sarana pembangunan di daerah tersebut.

Selain kesulitan-kesulitan tersebut kini GPID mulai menghadapi akibat dari arus kemajuan di kota yang mulai menimbulkan masalah terutama di kalangan generasi muda berupa pengangguran dan kenakalan remaja. Kesulitan-kesulitan ini tidak dapat diimbangi oleh perlengkapan GPID berupa Pendeta-pendeta/guru Injil Klasik-klasik yang selain pengetahuan Teologianya terbatas juga kurang mampu membawa pembaharuan atau menimbulkan partisipasi Jemaat baik dalam pelayanan Gereja maupun pembangunan.

Usulan proyek pembinaan warga Gereja Synode
Protestan Indonesia di Donggala, September 1979.
Departemen Agama No. 092

Salinan

Sabang, 21 Agustus 1950..

No. 881/19/RB.

Sus.:

Fokok: Meninggikan pendidikan rajjat dan me-
madjukan usaha kemah Sosial.

1. Dengan hormat, dima'lumkan kepada tuan, bahwa kini kita telah menduduki alam kita Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat dan berkat perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tjitatnja, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 ber-
tepatan pada hari ulang jang kelima dari Proklamasi 17-8-1945, tertjapailah " NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", jang menjadi hasrat kita semua.
2. Kini kita tiba pada suatu tugas kewadjan kita, selaku bangsa Indonesia jang sedjati atau warga negara Indonesia, wadjablah kita memperbaiki nasib2 kita sendiri "Firman Tuhan dalam kitab sutji, sesungguhnya Alla s.w.a. tiada akan mengubahkan nasib dari sesuatu kaum, terketjualti kaum itu inajaf dan sa-
dar untuk mengubahkan nasib2nja sendiri dari keburukan dab".
3. Maka mulai sekarang marilah kita memperbaiki factor2 jang kita utamakan sebagai berikut:
 - a. Menambah sekolah2 Umum dan mengadakan sekolah2 menengah.
 - b. Mengadakan sekolah Agama dan kepandaian gadis.
 - c. Menjelenggarakan rumah-rumah ibadah.
 - d. Mengadakan rumah jati.
 - e. Mengadakan rumah sakit dan berusaha memperbanyak obat2an.
4. Keinginan jang kita sebutkan diatas ini, hanya dapat kita wujudkan, djika-
kalau Pemerintah dan Rajjat terdapat suatu perikatan paham jang teguh antara satu kepada jang lain, djusteru suatu pekerjaan bersama guna dan untuk keba-
hagian bersama jami untuk masyarakat dan negara kita.
5. Sekali lagi kami sebutkan, untuk melahirkan tjitat2 jang indah mulia ini, selaku Bapa, kita mengambil ketetapan, supaya semua rajjat dalam Keradjaan Banawa dapat memberikan sokongan Sosialnja selaku kewadjan sebanyak 10% dari djumlah pokok padjahnja pada tiap tahun, terhitung pada tahun ini 1950. Kita djangan salah mengerti, bahwa sokongan ini diluar dari urusan padjak, pokok padjak jang disebut itu, hanya diambil menjadi suatu dasar sadja.
6. Sokongan ini diterima dan ditagih oleh tuan2 kepala kampung jang bersang-
kutan dan distor pada tuan kepala distrik setempat nanti oleh tuan2 kepala dis-
trik djumlah itu dimasukkan kepada Kas Keradjaan, untuk disahakan selanjutnja.
7. Mengharap banjak atas tundjangan usaha dan tohtiar dari tuan2 Kepala Dis-
trik, kepala2 kampung, ^{Setnan Arab}, pada memberi pendjelasan kepada rajjat, ka-
rena dengan djalan ini, kita dapat memberi isi kepada kemerdekaan kita.
Terima kasih..

Radja Banawa Donggala,
ttd.
(L. Lamaraena)..

kepada
Tuan Kepala Distrik B. Selatan
" " " B. Tengah
" " " B. Utara
" " Kampung Donggala
" " " Tg. Batu.

pada salinan jang sama djalan/c,
kepala pemerintah dph.,


D. Lamaraena..

Salinan surat Raja Banawa Donggala tanggal 21 Agustus 1950 tentang himbuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah Indonesia merdeka melalui pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan jaminan sosial kepada masyarakat. Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 222 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

DATA : KONDISI UMAT BERAGAMA DI SULAWESI TENGAH
TAHUN 1992 / 1993.

NO.	KABUPATEN / KODYA	JUMLAH PENDUDUK	PEMELUK - A G A M A						JKT.
			ISLAM	KRISTEN PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	LAIN	
1.	DONGGALA	786.685	640.427	105.220	7.447	31.467	2.214	-	
2.	BUCU TOLI-TOLI	230.975	218.143	9.920	699	1.057	1.149	7	
3.	P O S O	339.215	210.937	119.219	1.501	6.085	1.473	-	
4.	BANGGAI	337.444	243.440	70.193	8.144	14.878	383	406	
J U M L A H		1.694.319	1.312.915	304.552	17.791	53.487	5.129	413	
Prosentase		100 %	77.49 %	17.98 %	1,05 %	3,16 %	0,30 %	0,02 %	

Statistik jumlah rumah ibadah umat Islam dan kondisi umat beragama di Sulawesi Tengah dimuat dalam laporan "Bahan Temu Konsultasi Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)",
28 – 30 Januari 1993.

Departemen Agama No.323

ASLI/TEMBUSAN.

SURAT PINDJAMAN/PERDJANDJIAN.

Seksi No.

Pusat No.

Jang bertanda tangan dibawah ini :

1. Gubernur Sulawesi di Makassar, sebagai Wakil Negara Republik Indonesia selandjutnja disebut " NEGARA " dan
2. *Mellu* Umur . . . *18* thn.
Peladjar/Mahasiswa . . . *S. P. Peranda*
Kelas/Tingkat . *K. A* , bertempat tinggal di
K. Sabung Makassar, selandjutnja disebut "PAMINDJAM"

3. Mengingat,
Bahwa Negara telah memutuskan memberikan bantuan pindjaman wang kepada para peladjar dan mahasiswa jang perlu diberikan bantuan karena terputus perhubungan dengan orang tua/walinja, disebabkan oleh gangguan-gangguan keamanan (surat putusan Menteri P.F.dan K. tgl. 5 April 1958 No. 53141/K/1898).
bahwa Negara telah memberikan perantaraanja ; dan untuk melaksanakan maksud itu kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perdjandjian seperti berikut:
I. Negara memindjamkan kepada sipemindjam selama dibutuhkan tiap2 bulan Rp.150,- (SERATUS LIMA PULUH RUPIAH).-
II. Negara tidak memungut bunga atas pindjaman itu.
III. Pemindjam wadjab membajar pindjaman itu kembali sekali gus apa bila perhubungan mereka dengan orang tua atau wali mereka telah kembali kembali pula seperti semula (biasa).
IV. Pembayaran kembali pindjaman itu dapat dituntut dari orang atau wali pemindjam itu.
V. Negara tidak terikat pada soal-soal pembebasan bagaimana djuga sifatnja. Penghapusan pembajaran kembali tidak berlaku.
VI. Negara setiap waktu berhak menghentikan bantuan pindjaman itu.-

Makassar, *30 September* 19*58*.

NEGARA,
Gubernur Sulawesi.

Pemindjam ,

(. . .  *Mellu* . . .)

Surat perjanjian pinjaman dana dari pemerintah Provinsi Sulawesi atas nama negara kepada seorang pelajar yang bernama Mellu. Pelajar ini terbukti mengalami putus hubungan dengan orang tuanya sebagai akibat kekacauan politik yang terjadi di Sulawesi Tengah, 1958.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 431
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

=NDa
 42
 DAPTAH ISIAN PELADJAR/MAHASISWA
 JANG BERASAL DARI SULAWESI (X)

NO. PUSAT:
 NO. SEKSI: 72/Hind/II/
 8999/1958.

1. NAMA LENGKAP : A.W. BENDUJIE.
 2. Tempat dan tanggal lahir : POSO, tgl. 6 Desember 1932.

16. Hubungan paniti bagaimana dengan jang ditinggali sekarang. : _____
 17. Lain2 keterangan : _____

Makassar, Maret1958.-
 Jang bertanda telah mengisi daftar ini atas kebenaran.
 (.....)



Diketahui oleh Pemerintah Setempat:
 Kepala Sekolah/Pemimpin Pakultas
 (.....)

2. Kepala Instansi/Kecamatan :
 (.....)

3. Pemimpin Organisasi Peladjar :
 (.....)

X. Daftar ini sesudah diisi dikembalikan kepada Gubernur Sulawesi Bah : P.P.R. di Makassar dalam rangkang 6, dan dua belai diantaranya harus dibubuhi foto.-

Aris L.J.

Data pelajar yang mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi untuk melanjutkan sekolah di Makassar. Pelajar ini berasal dari Sulawesi Tengah yang daerahnya mengalami kekacauan.

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 431b
 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kesehatan

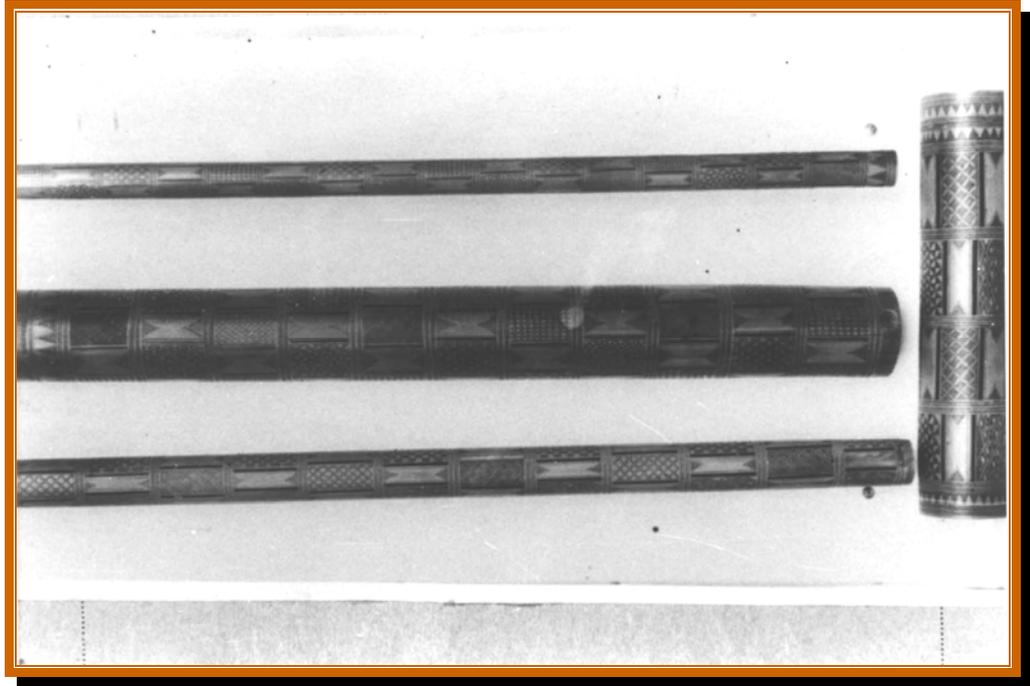


Rumah sakit di Palu, 1921.
KIT No. 0145/070

Kesenian dan Pakaian Adat



Alat musik Siter Kokonti dengan penyangga, Banggai.
KIT No. 0909/65



Empat tabung bambu panjang berukir "Tibaks".
KIT No. 0868/029



Sekelompok muda mudi memakai pakaian tradisional Palu, 1920.
KIT No. 146/14



Dua perempuan siap untuk menari.
KIT No. 412/006



Sekelompok muda mudi dalam tarian daerah Palu.
KIT No. 145/08



Perempuan dengan pakaian adat, Poso.
KIT No. 0457/20



Perempuan dalam pakaian khas Donggala.
Kempen 581012 TT 3-1

Daftar Arsip yang Diserahkan

DAFTAR ARSIP SULAWESI TENGAH YANG DISERAHKAN

A. PEMERINTAHAN

1. Kontrak Perjanjian antara Penguasa VOC dengan Raja Bwool dan Para Pembesar Kerajaan, ditandatangani di Ternate, 15 Agustus 1781.

15 lembar
Menado 66/2 K
2. Kontrak Perjanjian Penguasa VOC dengan Raja Banggai dan Para Pembesarnya, ditandatangani di Ternate, 5 Maret 1796.

36 lembar
Ternate 140
3. Salinan Kontrak Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Donggala, bernama Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona, tanggal 17 September 1854, terdiri dari 21 pasal.

20 lembar
Menado 66/2 L
4. Kaart van Celebes (Peta Sulawesi)

Daftar Arsip Kartografi
Nederlandsche Bezittingen in Oost Indie
No.12/Blad 12 Kode BB12/Blad 12. 1883 – 1885
5. "Korte Verklaring" (Plakat Pendek) antara Moeslaeni, Kepala Daerah Tojo, di Posso, dengan pemerintah Hindia Belanda, 15 Juli 1916.

13 lembar
Besluit 15 Juli 1916 no. 39
6. Keputusan mengenai besarnya gaji pesuruh di Kantor Asisten Residen Donggala.

5 lembar
Besluit 2 September 1918 no. 82

7. Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1919 no. 34 tentang garis batas antara daerah Sulawesi Tengah dan daerah Mamuju berdasarkan usul dari Wentholt (Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya) dengan proses verbal yang ditandatangani oleh kontrolir Donggala, raja Banawa, kontroler Palu, raja Palo, raja Dolo, raja Tobaku, raja Banao, disertai 1 peta.

42 lembar
Besluit 7 Maret 1919 no. 34

8. Peta Donggala-Zuid (Donggala Selatan)
Daftar Arsip kartografi No.2523/Blad 74-75/XXI-XXII/143
Reproductiebedrijf Topografische dienst, Batavia 1941

9. Surat dari para raja yang ada di Sulawesi Tengah afdeling Donggala kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) tanggal 8 Februari 1949 tentang permohonan untuk menetapkan kota Palu sebagai pusat Sulawesi Tengah.

2 lembar
Arsip Regering van Oost-Indonesie
Pemerintah Indonesia Timur, 1946 1950. No.77(a)
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

10. Surat pertimbangan rakyat Palu untuk menetapkan kota Palu sebagai pusat Sulawesi Tengah, April 1949.

3 lembar
Arsip Regering van Oost-Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) 1946 – 1950 No.77
Badan Arsip dan Perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

11. Surat dari Ketua-ketua Hadat Kotapitunggota Sigidolo kepada Pejabat Gubernur Sulawesi di Makassar tanggal 11 April 1951 tentang dukungan kepada Lamakaraka menjadi raja Sigidolo dan keinginan itu akan tetap dilanjutkan selama swapraja belum dihapuskan.

3 lembar

Arsip Pemerintah Sulawesi 1950 – 1960) No. 196(a)
Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi selatan

12. Peraturan Pemerintah no.137 tahun 1950 – 1960, Peraturan Pemerintah no. 33 Tahun 1952 tentang pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra

11 lembar
Sekkab

13. Surat dari Residen Koordinator Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi tanggal 3 November 1956 tentang calon-calon bupati baru.

2 lembar

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara –
Provinsi Sulawesi Selatan No.202
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Des 1/69/7 tentang berlakunya Undang Undang No.14 Tahun 1956 untuk daerah-daerah: Bonthain, Pare-pare, Mandar, Sulawesi Tenggara, Donggala, Bolaang-Mongondow, Poso, Sulawesi Utara, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1957.

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960, No.161
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

15. Undang Undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi.

14 lembar
Sekkab UU No.316

16. Surat dari Residen Koordinator Sulawesi Tengah di Palu kepada Gubernur Sulawesi di Makassar tanggal 8 Januari 1960 tentang permohonan pemberian status kawedanaan kepada swapraja Bungku.

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.196
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

17. Schetskaart van een deel van Noord-en Midden-Celebes (Peta Sulawesi Tengah dan Utara).

Daftar Arsip Kartografi No.2504/Blad I dan No.2505/Blad II
Topographische Inrichting, 1919

18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.47 Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.

5 lembar

Sekkab Perpu No.77

19. Daftar pembagian daerah administrasi Provinsi Sulawesi Utara – Tengah, 1961.

3 lembar

Inventaris Marzuki Arifin
No.123

B. POLITIK

20. Surat permohonan dari Datu Pamoesoë, Penguasa Daerah Dolo, Posso untuk bantuan keuangan. Yang bersangkutan dihukum buang selama 9 tahun di Ternate sejak bulan Agustus 1918.

34 lembar

Bt. 30 Desember 1920 no. 123

21. Laporan dari Asisten Residen Sulawesi Tengah tanggal 25 Maret 1917 tentang kerusakan yang terjadi di Palu dilakukan oleh Toma I Dampo dan kawan-kawan.
4 lembar
Bt. 7 November 1917 no. 21
22. Laporan mengenai keadaan politik di Karasidenan Manado Tahun 1916 termasuk catatan tentang jumlah kriminalitas, April 1917.
9 lembar
Alg. Verslag Menado 1893
23. Komandan Operasi Insjaf, Overste Roekminto, meninjau rumah penjara Palu, April 1958.
Kempen 580408 SS 20
24. Anggota-anggota Pemuda Revolusioner dari Permesta yang ditawan di penjara Palu.
Kempen 580408 SS 32
25. Overste Roekminto bertanya jawab dengan para tawanan Permesta di Palu, 8 April 1958.
Kempen 580408 SS 26
26. Peta Poso.
Daftar Arsip Kartografi (Peta Indonesia 1913 – 1946)
No.2531/Blad 78 – 79/XXII – XXIII/143
Reproductiebedrijf Topografische dienst, Batavia, 1941
27. Laporan bulanan Kepala Bagian Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi tentang daerah Poso bulan April 1953 yang berkaitan dengan kondisi pemerintahan , politik, ekonomi dan sebagainya.
1 lembar
Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara-
Provinsi Sulawesi Selatan No.644

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

28. Surat dari Polisi Negara Kantor Wilayah Palu Bagian Dinas Security tanggal 24 April 1954 tentang surat dari Tentara Islam Indonesia (TII) Comando Operasi D "II" berkaitan dengan strategi operasi TII di sekitar daerah Sulawesi Tengah.

2 lembar

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara –
Provinsi Sulawesi Selatan No.539

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

29. Salinan kawat dari Kabag Keamanan Provinsi Sulawesi kepada Kepala Polisi Provinsi Sulawesi di Makassar tanggal 26 April 1954 tentang kontak senjata antara satuan Mobile Brigade dengan gerombolan pengacau bersenjata di daerah Kolonedale (Poso).

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950 – 1960 No.273

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

30. Surat Keputusan Kepala Daerah Poso No.5/26 April 1954 tentang permohonan bantuan militer kepada Komandan Sector 5 Bn.712., bantuan militer itu dimaksudkan untuk menumpas gerakan gerombolan pengacau yang masih bersembunyi di sekitar distrik Bahodopi, Bungku, Wosu dan Salabangka.

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

31. Surat Keputusan Kepala Daerah Poso No.9/5 Juli 1954 tentang penghentian bantuan militer untuk daerah swapraja Bungku dan Mori terhitung sejak tanggal 26 Juni 1954.

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

32. Laporan Pemerintah Negeri Kolonodale kabupaten Poso tanggal 25 Pebruari 1955 tentang kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan yang menamakan dirinya Tentara Islam Indonesia.

1 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No.273
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

33. Surat dari Pejabat Gubernur Sulawesi kepada seluruh Kepala Daerah (bagian politik) di Provinsi Sulawesi, tanggal 12 Desember 1955 tentang permintaan pengiriman daftar gerakan mistik yang ada di masing-masing daerah.

1 lembar

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulselra)-
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) No.733
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

34. Surat dari Residen Koordinator Sulawesi Tengah di Palu kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Bahagian Politik di Makassar tanggal 23 Agustus 1956 tentang tidak ditemukannya gerakan-gerakan mistik baru di Sulawesi Tengah.

1 lembar

Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulselra)-
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) No.733
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

35. Sketch map of Middle – Celebes (Sulawesi Tengah).

Daftar Arsip Kartografi No.2509/Sheet No.7/141
Army Map Service US Army Washington D.C.111301
Reprint October 1942

36. Pernyataan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah tanggal 7 Maret 1958 yang berisi tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10 lembar

Kabinet Presiden No.823

C. KUNJUNGAN PRESIDEN / GUBERNUR

37. Perjalanan Presiden Soekarno ke Maluku dan Sulawesi pada tanggal 10 – 26 Nopember 1951: dengan naik perahu rombongan Presiden Soekarno menuju pantai dari pesawat terbang Catalina waktu tiba di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 7
38. Gadis-gadis Poso dengan berpakaian adat menyambut Presiden Soekarno waktu tiba di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 30
39. Rapat raksasa di Poso, 21 Nopember 1951.
Kempen 511121 SS 4
40. Pemandangan rapat raksasa di Poso.
Kempen 511121 SS 21
41. Presiden Soekarno di tengah-tengah wanita Poso yang berpakaian adat.
Kempen 511121 SS 8
42. Presiden Soekarno dengan para penari adat di Poso.
Kempen 511121 SS 15
43. Upacara peresmian Tugu Kemerdekaan di Poso, Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga.
Kempen 511121 SS 23
44. Upacara peresmian Tugu Kemerdekaan di Poso, Gubernur Sudiro meletakkan karangan bunga.
Kempen 511121 SS 25
45. Barisan Penghormatan dari Angkatan Laut dan Polisi menyambut kedatangan Gubernur Sudiro di Pelabuhan Toli Toli.
Kempen Provinsi Sulawesi M. 6240.

D. BANGUNAN

46. Benteng Sumur Kopi, Palu. 1920.
KIT No. 145/86
47. Nisan dan makam Raja Gowa terakhir di areal Masjid Donggala.
KIT No. 815/62
48. Gedung Studio Radio Republik Indonesia Lokal di Donggala, Palu.
Kempen 580409 SS 2-1
49. Kantor Kas Perbendaharaan Negara di Donggala.
Kempen 580409 SS 2-2
50. Kantor Agraria Kawedanaan Donggala dan Kantor Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, Donggala.
Kempen 580409 SS 2-3
51. Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala yang hancur akibat bom Permesta dilihat dari sebelah dalam.
Kempen 580530 SS 6

E. SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

52. Peta Paloe (Palu)
Daftar Arsip Kartografi No.2527/Blad 76-77/XXI-XXII/143
Reproductiebedrijf Topografische Dienst, Batavia 1941
53. Jembatan penyeberangan, Palu, 1920.
KIT No. 145/072
54. Orang-orang yang sedang naik perahu di Donggala.
KIT No. 705/54

55. Pemandangan kota Palu yang sudah dibebaskan dari cengkraman Permesta, kendaraan Cikar melakukan tugasnya sehari-hari seperti sedia kala.
Kempen 580411 SS 1
56. Pelabuhan udara Masowa sekitar 12 Km dari Palu.
Kempen 580408 SS 10
57. Bomber AURI dengan Pelabuhan Udara Masowa di Palu, 8 April 1958.
Kempen 580408 SS 7
58. Memperbaiki hubungan telepon di Palu.
Kempen 580408 SS 34
59. Sado-sado sedang menunggu penumpang di Pasar Palu, 11 April 1958.
Kempen 580411 SS 4

F. PEREKONOMIAN / PERDAGANGAN

60. Laporan Asisten Residen Menado tentang penduduk Posso asli, yang disebut Tolage Alfuren, 25 Maret 1891 no. Lr.K.
2 lembar
MGS 21 Juli 1891 no. 148 Geheim
Besluit 13 Juli 1893 no. 15
61. Surat Sekretaris Gubernur tentang penetapan Posso lalu lintas perdagangan yang penting/urgent di daerah Teluk Tomini dan Bwool sebagai tempat singgah di pantai utara Sulawesi
10 lembar
MGS 13 Juli 1893 no. 1775 a
Besluit 13 Juli 1893 no. 15

62. Ringkasan dari laporan perjalanan tahun 1889 mengenai keadaan kerajaan-kerajaan di Pantai Utara, antara lain tentang Bwool, sebagai bagian dari berkas mengenai kontrak politik baru dengan Bolaang Mongondo dari wilayah lain di pantai utara Sulawesi. Oktober 1891

8 lembar

Kommissorial 14 Oktober 1893 no. 18399

Besluit 13 Juli 1893 no. 15

63. Peta Toli-Toli.

Daftar Arsip Kartografi, No.2529/Blad 78-79/XV – XVI/143
Reproductiebedrijf Topografische dienst, Batavia 1940

64. Toli-Toli, daerah kopra di Sulawesi.

KIT No. 0630/043

65. Perempuan di pasar di Palu, 7 Oktober 1924.

KIT No. 124/69

66. Keadaan di Pasar Palu yang telah dibebaskan dari tangan Permesta, Jual beli berjalan lancar. 12 April 1958.

Kempen 580412 SS 3

67. Orang-orang telah mulai berjualan seperti biasa di Pasar Palu, setelah peristiwa Permesta, 12 April 1958.

Kempen 580412 SS 1

68. Tambang emas di Paleleh.

KIT No. 486/76

G. KERAJINAN

69. Rok/celemek yang dipakai untuk bekerja di dapur sedang digantung, Sulawesi Tengah.

KIT No. 690/4.

70. Tikar yang dipakai untuk menutupi kepala dari siraman air hujan, Sulawesi Tengah.

KIT No. 691/50

71. Motif kain panjang tutup kepala dengan junbai-jumbai dari Galumpang.

KIT No. 714/10

72. Motif kain katun cap ikat pinggang "Kain Sarita", kain tenun ikat dari Sigi dan Bada.

KIT No. 728/84

73. Topeng dari batu ditemukan dalam periuk penyimpanan abu jenazah di Napoe.

KIT No. 815/72

H. PEMUKIMAN

74. Rumah administrateur di Palu, 1920.

KIT No. 0145/82

75. Rumah panggung di Bwool/Buol.

KIT No. 831/3

76. Rumah panggung beratap sirap di desa Tapekalo.

KIT No. 832/4

77. Rumah-rumah penduduk di Donggala.

KIT No. 0832/067

78. Rumah panggung kayu beratap rumbia Trifin Mowa, Donggala.

KIT No. 9832/69

79. Rumah penduduk di Lamba, distrik Napoe.

KIT No.0834/83

80. Rumah penduduk di Donggala, Sulawesi Tengah, April 1958.
Kempen 580410 SS 1-2

I. AGAMA DAN PENDIDIKAN

81. Bagian dari Laporan politik Karesiden Manado, 1893, mengenai evangelisasi (penyebaran agama Kristen) di Poso.
2 lembar
Alg.Verslag Manado No.4887, 9 Maret 1893
82. Usulan proyek pembinaan warga Gereja Synode Gereja Protestan Indonesia di Donggala, September 1979.
9 lembar
Deppag No. 092
83. Salinan surat Raja Banawa Donggala tanggal 21 Agustus 1950 tentang himbauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah Indonesia merdeka melalui pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan jaminan sosial kepada masyarakat.
1 lembar
Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 222
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
84. Statistik jumlah rumah ibadah umat Islam dan kondisi umat beragama di Sulawesi Tengah dimuat dalam laporan "Bahan Temu Konsultasi Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)", 28 – 30 Januari 1993.
12 lembar
Deppag No.323
85. Surat pernjanjian pinjaman dana dari pemerintah Provinsi Sulawesi atas nama negara kepada seorang pelajar yang bernama Mello. Pelajar ini terbukti mengalami putus hubungan dengan orang tuanya sebagai akibat kekacauan politik yang terjadi di Sulawesi Tengah, 1958.
1 lembar
Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 431
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

86. Data pelajar yang mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi untuk melanjutkan sekolah di Makassar. Pelajar ini berasal dari Sulawesi Tengah yang daerahnya mengalami kekacauan.

2 lembar

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 No. 431b

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

J. KESEHATAN

87. Rumah sakit di Palu, 1921.

KIT No. 0145/070

88. Bagian dari laporan umum Keresidenan Manado Tahun 1916, mengenai keadaan kesehatan penduduk. Disebutkan di "onderafdeeling Posso, ada 79 orang penderita sakit dada, 23 orang diantaranya meninggal dunia.

2 lembar

Tzg. Ag.15835/1917

K. KESENIAN DAN PAKAIAN ADAT

89. Alat musik Siter Kokonti dengan penyangga, Banggai.

KIT No. 0909/65

90. Empat tabung bambu panjang berukir "Tibaks".

KIT No. 0868/029

91. Sekelompok muda mudi memakai pakaian tradisional Palu, 1920.

KIT No. 146/14

92. Dua perempuan siap untuk menari.

KIT No. 412/006

93. Sekelompok muda mudi dalam tarian daerah Palu.
KIT No. 145/08
94. Perempuan dengan pakaian adat, Poso.
KIT No. 0457/20
95. Perempuan dalam pakaian khas Donggala.
Kempen 581012 TT 3-1

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sulawesi Tengah Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.